



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM GERAKAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA KEPULAUAN RIAU (GERDAM KEPRI)

OLEH :

YENI ARDIANTI, S.Si

NIP. 19820110 200604 2 022

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

2022

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan dengan judul **“Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)”**.

Laporan aksi perubahan ini merupakan salah satu syarat yang harus dilalui oleh para peserta Pelatihan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Penulisan laporan aksi perubahan ini dapat terselesaikan dengan baik, tentunya semua ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Gubernur Kepulauan Riau, Bapak H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Drs. Adi Prihantara, M.M.
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Bapak Sugeng Hariyono.
4. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan, Bapak Muhammad Rizal, S.E., M.Si.,
5. Kepala Dinas Sosial, Bapak Drs. Eko Sumaryadi, selaku Mentor yang telah memberikan arahan dan memotivasi Penulis dalam penyusunan dan pelaksanaan aksi perubahan sehingga laporan pelaksanaan aksi perubahan ini dapat tersaji dan terpresentasikan dengan baik.
6. Bapak Ir. Gunawan, MA, selaku Coach yang telah melakukan bimbingan dan memotivasi Penulis dalam penyusunan dan pelaksanaan aksi perubahan ini sehingga laporan pelaksanaan aksi perubahan ini dapat tersaji dan terpresentasikan dengan baik.
7. Bapak Drs. Dian Andi Permana M.Si selaku Penguji Seminar Aksi Perubahan atas masukan yang sangat berarti bagi Penulis dalam melaksanakan aksi perubahan ini baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang.
8. Ibu Dr. Tutik Lestari, M.Pd., Kepala Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan Pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan.

9. Suami, anak dan keluarga besar atas doa dan dukungan moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan program Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini sampai akhir pelatihan.
10. Bapak Drs. Machmudan, M.Si selaku Direktur Angkatan II.
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau selaku pemberi dukungan pada aksi perubahan, Bapak Drs. H. Sardison, M.TP.
12. Para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan semua teman-teman pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang telah membantu dalam penyelesaian laporan Aksi Perubahan ini.
13. Seluruh Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang telah berjuang bersama dan memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis mulai dari pembuatan rancangan sampai dengan seminar aksi perubahan ini dilaksanakan.
14. Para Widyaiswara di BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
15. Seluruh Panitia Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
16. Seluruh peserta Angkatan II dan Angkatan III Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Peserta menyadari bahwa laporan aksi perubahan ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan implementasi jangka panjang pada aksi perubahan. Akhir kata dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati penulis, Semoga laporan ini menambah wawasan dan memberi manfaat bagi pembaca. Aamiin YRA.

Tanjungpinang, November 2022

Yeni Ardianti, S.Si

LEMBAR PERSETUJUAN EVALUASI IMPLEMENTASI
AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

Judul : **Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)**

Nama : YENI ARDIANTI, S.Si

NIP : 19820110 200604 2 022

Pangkat / Golongan : III.d / Penata Tk. I

Jabatan : Sekretaris

Unit Kerja : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Implementasi Aksi Perubahan (IAP) Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2022.

Jakarta, November 2022

Coach,

Mentor,

(Ir. GUNAWAN, MA)

(Drs. EKO SUMARYADI)

LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI IMPLEMENTASI
AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

Judul : **Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)**

Nama : YENI ARDIANTI, S.Si

NIP : 19820110 200604 2 022

Pangkat / Golongan : III.d / Penata Tk. I

Jabatan : Sekretaris

Unit Kerja : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Telah diseminarkan dan disempurnakan berdasarkan masukan dari Penguji, Coach dan Mentor pada tanggal 08 November 2022.

Jakarta, November 2022

Coach,

Mentor,

(Ir. GUNAWAN, MA)

(Drs. EKO SUMARYADI)

Penguji,

.....



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL
Jalan Sultan Masyur Syah Pulau Dompok
Email : sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN TAHUN 2022

DENGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENI ARDIANTI, S.Si
NIP : 19820110 200604 2 022
Pangkat / Golongan : III.d / Penata Tk. I
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Adalah sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator bersedia untuk Menyelesaikan dan Menindak Lanjuti target aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) setelah selesai mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

Demikian pakta integritas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Mentor

Drs. Eko Sumbaryadi

Pembina Utama Madya / IV d

NIP. 19631117 199103 1 013

Jakarta, November 2022

Peserta

Yeni Ardianti, S.Si

Penata Tk. I / III d

NIP. 19820110 200604 2 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN EVALUASI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI.....	v
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
EXECUTIVE SUMMARY	x
a. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	12
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	12
2. Pengelolaan Budaya Kerja.....	17
3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi	19
4. Strategi Pengembangan Kompetensi	28
b. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	32
1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi	32
2. Manfaat Aksi Perubahan.....	35
3. Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan...36	
c. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	47
1. Tindaklanjut Kegiatan Jangka Pendek dengan menetapkan target capaian jangka menengah dan jangka panjang.....	47
d. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	48
1. Diagnosa Organisasi.....	48
2. Manajemen Pemerintahan	50
3. Pembangunan Ekonomi Hijau	53
4. Pengadaan Barang dan Jasa	54
e. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	57
1. Penerapan strategi Komunikasi	57
2. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi aksi perubahan..	61
f. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	62
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	70
PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai-nilai integritas	13
Tabel 2. Nilai-Nilai Membangun Akuntabilitas kinerja	15
Tabel 3. Pengelolaan Budaya Kerja	18
Tabel 4. Matriks Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi	21
Tabel 5. Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial Prov. Kepri	29
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 s/d 2021	33
Tabel 7. Capaian Milestone Implementasi Aksi Perubahan	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pemetaan Stakeholder	26
Gambar 2.	Model Struktur Tim Rancangan Aksi Perubahan	27
Gambar 3.	Rapat Persiapan Internal Dinas Sosial Prov Kepri	57
Gambar 4.	Rapat Melaksanakan pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan	58
Gambar 5.	Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan	58
Gambar 6.	Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan	59
Gambar 7.	Rapat Pembahasan koordinasi internal penyusunan rancangan Pergub Upaya Pengentasan Kemiskinan	59
Gambar 8.	Rapat Konsultasi dengan Mentor Bapak Drs. Eko Sumbaryadi.....	60
Gambar 9.	Rapat Internal Kantor penyusunan rancangan SOP	60
Gambar 10.	Foto Bersama Bapak Gubernur Kepulauan Riau	62
Gambar 11.	Foto Bersama Tim Mendukung Aksi Perubahan	66
Gambar 12.	Foto Bersama Staf Dinas Sosial	67
Gambar 13.	Foto Menjelaskan terkait PERGUB GERDAM KEPRI	68

EXECUTIVE SUMMARY

Untuk mencapai sebuah kemajuan dan kinerja organisasi yang lebih baik serta terwujudnya target organisasi yang telah ditentukan, dibutuhkan sebuah perubahan melalui manajemen atau aksi perubahan organisasi yang dilakukan dengan menerapkan inovasi yang dapat mempercepat pencapaian kinerja secara signifikan, efektif, efisien dan tepat sasaran.

Kondisi aktual di lapangan masih menunjukkan besarnya jumlah dan makin kompleksnya kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasiswaan, korban bencana dan lain sebagainya. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat, dunia usaha, dengan indikator: (1) terciptanya aksesibilitas terhadap pelayanan sosial; (2) meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (3) meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, dan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*, Dinas Sosial melaksanakan **penyelenggaraan kesejahteraan sosial**, yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk *pelayanan sosial* dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diklasifikasikan ke dalam 26 jenis dalam *Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012*: (1) Anak Balita Terlantar (ABT); (2) Anak Terlantar; (3) Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); (4) Anak Jalanan; (5) Anak dengan Disabilitas; (6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan; (7) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); (8) Lanjut Usia Terlantar; (9) Penyandang Disabilitas; (10) Tunasusila; (11) Gelandangan; (12) Pengemis; (13) Pemulung; (14) Kelompok Minoritas; (15) Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahankomunitas (BWBLP); (16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA); (17) Korban Penyalahgunaan NAPZA; (18) Korban Trafficking (Korban Perdagangan Orang); (19) Korban Tindak Kekerasan (KTK); (20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS); (21) Korban Bencana Alam (KBA); (22) Korban Bencana Sosial (KBS); (23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE); (24) **Fakir Miskin (FM)**; (25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP); (26) Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Dari 26 jenis PPKS tersebut, fakir miskin merupakan jenis PPKS yang cakupan penanganannya sangat rendah. Berdasarkan data *Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Kepulauan Riau No. 42/07/21/Th. XVII*, pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 151.680 orang (6,24 %), yakni bertambah 13,9 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2021, yaitu 137.750 orang (5,75 %). Penyebab kemiskinan di Kepulauan Riau dipicu oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar. Di lain pihak, anggaran penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial pada tahun 2022 hanya Rp3,43 miliar. Anggaran tersebut memaksa Dinas Sosial untuk menetapkan target penerima bantuan dengan jumlah kecil, yakni hanya 6.963 orang atau 5,05% dari 137.750 orang.

Tujuan dilakukan aksi perubahan mendorong dan memfasilitasi masyarakat kelas menengah dan kelas atas serta dunia usaha untuk secara kolaboratif membantu masyarakat kurang mampu. Tahapan kegiatan (milestone) yang dijalankan dalam implementasi aksi perubahan ini dilakukan mulai dari pembentukan tim efektif, dilanjutkan dengan merancang desain dan membangun sistem, kemudian berkoordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal, melaksanakan uji coba sistem saat pelaksanaan kegiatan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan pembuatan laporan.

Hasil yang dicapai dalam aksi perubahan ini adalah tersedianya sebuah Sistem yaitu “**Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri)**”, yaitu sebuah gerakan yang melibatkan masyarakat kelas menengah dan kelas atas serta dunia usaha untuk berperan serta dalam membantu masyarakat kurang mampu.

A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Integritas kerja merupakan hal yang sangat dasar jika ingin membangun kinerja yang professional. Integritas seringkali disederhanakan sebagai makna dari kejujuran, memiliki perilaku baik, bermoral serta mampu menerjemahkan “kepercayaan” dalam konteks berorganisasi. Sebagai bagian dari etika, integritas tidak selalu berbicara perihal penyerahan otonomi pada setiap individu, namun lebih pada konteks loyalitas, *teamwork*, serta mampu menjaga kepercayaan dalam bekerja. Sehingga, peran pemimpin menjadi unsur penting pada penggerak organisasi dalam mengelola manajemen serta memunculkan motivasi kerjasecara optimal pada suatu organisasi. Karena pada dasarnya sumber daya manusia sangat penting bagi suatu lembaga dalam mengelola, mengatur, dan menjalankan kegiatan di suatu organisasi untuk mencapai kemampuan secara maksimal dan profesional¹.

Peran kepemimpinan dalam membangun integritas kinerjaorganisasi dapat ditopang oleh lima hal pokok, yaitu:

- a. Etika Kepemimpinan berbicara mengenai standar normatif serta hal-hal yang bernilai baik yang mampu dipedomani oleh seorang pemimpin dalam menjalankan atau mengorganisir organisasinya yang terdiri dari: memimpin dengan contoh, menetapkan harapan yang jelas, mengaplikasikan nilai-nilai organisasi, membuat keputusan yang dipercaya, komunikasi yang baik dengan bawahan, menilai bawahan, dan mengembangkan keterampilan dalam memimpin;
- b. Manajemen dan pengawasan aktif: Memanfaatkan alat manajemen yang tersedia dengan melakukan proses pengawalan kerja bawahan, evaluasi kinerja bawahan, memeriksa dan mengidentifikasi potensi masalah, menumbuhkembangkan pembelajaran berkelanjutan;
- c. Pemilihan orang yang tepat: mempromosikan kode etik, menerapkan nilai-nilai organisasi, mendidik bawahan tentang tanggung jawab etika, praktik pengambilan keputusan etis, mengidentifikasi role model, belajar dari kesalahan, bertindak preventif, dan memberikan penghargaan atas kinerja bawahan;

¹ Sunyoto Danang, Manajemen dan Perkembangan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Erlangga, 2002, hal. 97

- d. Proses yang efektif: Konsultasi bersama bawahan, penilaian risiko perilaku, memonitor kecenderungan, memperkuat kebijakan, monitor kepatuhan, melakukan audit, melibatkan dukungan, menyertakan etika dan integritas, penggunaan skenario; dan
- e. Pelaporan yang professional: Berbagi tanggung jawab, mendorong pelaporan yang professional, mengaktifkan pelaporan, mengetahui tanggung jawab, menciptakan budaya pelaporan yang aman, memantau kesehatan dan keselamatan, dukungan bawahan, mencari umpan balik, dan melakukan review penanganan pengaduan.

Selama pelaksanaan aksi perubahan, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam rangka membangun hubungan kerja yang berintegritas. Adapun nilai-nilai yang diterapkan yaitu tanggung jawab, taat asas, objektif, kepedulian dan komitmen (tabel terlampir).

Tabel 1. Nilai-nilai integritas

No	Indikator Integritas	Implementasi	Evidence
1	Tanggung jawab	Memberikan tanggung jawab kepada Tim efektif untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam mendukung aksi perubahan melalui legalitas surat keputusan	 <p>The evidence for the first row consists of two documents. On the left is a meeting agenda titled 'REVISI AGENDA KONSOLIDASI TIM EFEKTIF DAN PERENCANAAN KEGIATAN MELAKUKAN AUDIT DAN MONITORING KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022'. It lists various activities and their scheduled times. On the right is a table with columns for 'No', 'Nama', 'Jabatan', and 'Kategori'. It lists several individuals, including 'Aulia Dinda' and 'Rizka Nur Hafidha', with their respective positions and categories.</p>
2.	Taat Asas	Melaksanakan konsolidasi rutin bersama tim efektif, dalam rangka penyempurnaan “GERDAM Kepri”	 <p>The evidence for the second row is a photograph showing a group of people seated around a large conference table in a meeting room. They appear to be engaged in a discussion or meeting. The room has a modern interior with a patterned wall and a large window.</p>

3.	Objektif	Melibatkan staf yang berkompoten sesuai bidang terkait dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan	
4.	Kepedulian	Meningkatkan rasa kepedulian kepada Tim Efektif dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan	
5.	Komitmen	Penulis bersama Tim efektif mampu melaksanakan aktivitas aksi perubahan sesuai dengan <i>timeline</i> yang telah direncanakan	

Akuntabilitas, merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sedangkan Kinerja dimaknai sebagai sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan startegis suatu organisasi.

Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan

kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan menjadi wadah bagi pertanggung jawaban seluruh instansi pemerintah.

Adapun akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan merupakan hal yang strategis bagi organisasi/Instansi, terutama bagi kepemimpinan administrator, karena merupakan langkah menegakkan pengelolaan administrasi kepada pimpinan organisasi menuju *good governance*. Akuntabilitas kinerja bagi pemimpin merupakan instrumen untuk merubah *mindset* dan *culture* set dalam penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja pada output menjadi berorientasi kepada kinerja kepada *outcome*.

Dari definisi akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan organisasi di atas, penulis dalam melaksanakan implementasi aksi perubahan telah menanamkan nilai-nilai akuntabilitas kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2. Nilai-Nilai Membangun Akuntabilitas kinerja

No	Indikator/Aspek Akuntabilitas	Implementasi	Evidence
1	Transparansi	Hubungan komunikasi selalu dilaksanakan dengan keterbukaan informasi, koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja melalui pertemuan rutin Tim Efektif dalam setiap Kesempatan Keterbukaan informasi terkait rencana pelaksanaan aksi perubahan, dengan aktif melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Mentor.	

2.	Merubah mindset dari berorientasi output menjadi outcome	Meyakinkan kepada unit kerja bahwa GERDAM Kepri yang dibangun ini akan membawa perubahan kinerja organisasi yang lebih baik, tidak hanya sekedar pelaksanaan kegiatan lalu mendapatkan hasil indeks pada jangka pendek, tetapi bagaimana keberlanjutan program GERDAM Kepri ke depannya (jangka panjang)	
3.	Partisipatif Representatif	Dalam implementasi aksi perubahan, reformer sebagai Ketua Tim telah mengikut sertakan staf unit kerja sebagai anggota Tim Efektif terlibat secara aktif pada setiap tahapan kegiatan yang telah ditentukan	
4.	Evaluasi dan review	Melaksanakan evaluasi dan review pasca pelaksanaan uji coba GERDAM Kepri untuk mengetahui sejauh mana kekurangan dari Program yang sudah terbangun, serta upaya yang dilakukan dalam perbaikan program ke depan	

2. **Pengelolaan Budaya Kerja**

Budaya kerja diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pribadi atau pegawai pada suatu unit kerja, jika terjadi pelanggaran atas kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun secara moral, pelaku organisasi telah menyepakati adanya bentuk kebiasaan yang mestinya harus ditaati guna memaksimalkan aktivitas positif untuk mencapai tujuan unit kerja.

Membangun budaya kerja yang kuat, professional dan solid perlu dilakukan melalui perencanaan serta pengelolaan manajemen yang tepat. Sehingga peranan seorang pemimpin dinilai memiliki pengaruh penting dalam membangun budaya kerja di lingkungan kerja serta memastikan hal tersebut memiliki nilai-nilai positif dalam membangun tujuan unit kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, dilingkungan pemerintahan, telah disederhanakan nilai-nilai penting yang berlandaskan Pancasila, Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai fondasi kokoh dalam penguatan budaya kerja yang professional, sehingga semua instansi pemerintah diharapkan mampu tumbuh di atas fondasi dimaksud guna mencapai tujuan bersama yang mengerucut pada Visi Misi Indonesia Maju.

Bentuk pengelolaan budaya kerja yang diterapkan dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yaitu Berintegritas, Nasionalisme, Profesionalisme, dan Terpuji. Tentunya dalam mewujudkan nilai-nilai budaya kerja tersebut, masing-masing unit kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan budaya organisasi yang diawali dari penyusunan nilai-nilai, kemudian diinternalisasikan melalui beberapa aktivitas seperti komunikasi, internalisasi serta pengimplementasian yang diterapkan langsung oleh individu pegawai dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

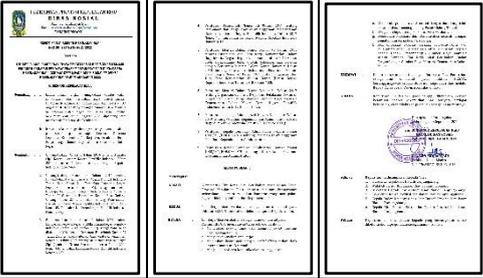
Budaya kerja pada unit kerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya sudah diterapkan dari mulai adanya komitmen pimpinan dalam bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan program, melaksanakan komunikasi dua arah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, pimpinan memberikan motivasi pada bawahannya dalam meraih suatu keberhasilan proses kerja, meningkatkan semangat dan kemampuan kerja, kerjasama melalui

kelompok serta menerapkan sikap dan perilaku disiplin pada pegawainya yaitu jujur pada diri sendiri, tidak menunda-nunda tugas dan kewajibannya dan memberikan yang terbaik bagi unit kerja.

Dalam rangka pengelolaan budaya kerja, kegiatan aksi perubahan pada Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI) bersama tim efektif dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip budaya kerja yang bersifat membangun, sebagaimana tabel berikut.

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah.

Tabel 3. Pengelolaan Budaya Kerja

No	Indikator	Implementasi	Evidence
1.	Membangun komitmen dan menentukan arah	Dengan membentuk SK Tim merencanakan maksud tujuan, objek sasaran, pembagian tugas	
2.	Orientasi pada hasil	Rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja tim internal, melalui rapat berkala	
3.	Profesional dan melayani	Mendorong Tim untuk melaksanakan kegiatan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri (<i>stakeholder</i>) dengan baik	

4.	Dukungan kreativitas tim	Memberikan dukungan penuh terhadap kinerja tim efektif, dalam rangka pengembangan inovasi yang bermanfaat, khususnya pada proses Program GERDAM Kepri	
5.	Membangun soliditas tim dan kebersamaan	Mengajak Tim untuk bersama-sama melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal demi tercapai tujuan yang diinginkan bersama	
6.	Transparansi	Melaksanakan konsultasi dan melaporkan hasil atau progress aksi perubahan dengan mentor	
7.	<i>Teamwork</i>	Menciptakan pembagian kerja sesuai tupoksi dan mampu me <i>manage</i> tim dalam bekerja	

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Jejaring kerja merupakan proses aktif dalam membangun serta mengelola hubungan-hubungan produktif baik secara personal maupun organisasi. Jejaring kerja atau yang lebih dikenal sebagai mitra atau partnership, yang secara etimologis berasal dari kata partner dengan arti pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon.

Sedangkan *partnership* diterjemahkan persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Mekanisme pembangunan jejaring dan kolaborasi yang dilaksanakan pada aksi perubahan ini dimulai dengan memetakan stakeholders (stakeholder internal dan eksternal, pengaruh dan kepentingan, peran dan keterlibatan, dan strategi komunikasi) pada rancangan aksi perubahan.

Adapun pelaksanaan membangun jejaring kerja dan kolaborasi yang dilaksanakan selama tahapan aksi perubahan dapat dijabarkan pada tabel berikut.

Stakeholders pada aksi perubahan ini terdiri dari stakeholders internal dan stakeholders eksternal.

- a. Stakeholder Internal merupakan stakeholder yang dipengaruhi secara langsung oleh Aksi Perubahan. Stakeholder tersebut secara teknis mempunyai kontribusi yang besar, sehingga merupakan stakeholder yang berperan memperlancar terhadap keberhasilan Aksi Perubahan yang dilaksanakan. Stakeholder Internal dalam Aksi Perubahan ini adalah :
 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
 3. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelola Sumber Dana Sosial;
 5. Sub Koordinator Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 6. Sub Koordinator Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 7. Sub Koordinator Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 8. Sub Koordinator Perencanaan & Evaluasi.
- b. Stakeholder Eksternal merupakan stakeholder yang mempunyai pengaruh (*influence*), kepentingan (*interest*) dan keterlibatan yang sangat kuat terhadap keberhasilan Aksi Perubahan, memiliki pengaruh terhadap kegiatan Pemerintah dan keberadaannya sangat penting bagi organisasi yang memiliki program tersebut.

Stakeholder Eksternal dalam Aksi Perubahan ini adalah :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Forum CSR;
6. Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Riau;
7. Masyarakat Kelas Menengah dan Kelas Atas;
8. Dinas Sosial Kabupaten/Kota; dan
9. Media Massa.

Adapun pelaksanaan membangun jejaring kerja dan kolaborasi yang dilaksanakan selama tahapan aksiperubahan dapat dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Matriks Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

No	Stakeholder	Peran	Komunikasi cara mempengaruhi	Evidence
1	Gubernur Kepulauan Riau	Memiliki peranan dan pengaruh sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan aksi perubahan	Meyakinkan akan mendukung pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	

2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Memiliki peranan dan pengaruh sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan aksi perubahan	Meyakinkan akan mendukung pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Memiliki peranan dan pengaruh sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan aksi perubahan	Meyakinkan akan mendukung pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	
4.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Memiliki peranan dan pengaruh sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan aksi perubahan	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	

5.	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Memiliki peranan dan pengaruh sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan aksi perubahan	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	 
6.	Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau	Memiliki peranan dan pengaruh sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan aksi perubahan	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung pergub ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	 
7.	Forum CSR	Memiliki peranan dan pengaruh sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan aksi perubahan	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	 

8.	Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Riau	Memiliki peranan dan pengaruh sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan aksi perubahan	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	
9.	Masyarakat Kelas Menengah dan Kelas Atas	Memiliki peranan dan pengaruh sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan aksi perubahan	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	
10.	Dinas Sosial Kabupaten/Kota	Memiliki peranan, pengaruh akan tetapi secara tidak langsung dalam Perubahan	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	
11.	Media Massa	Menginformasi melalui Web Media Online	Menginformasikan Aksi Perubahan pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	<ul style="list-style-type: none"> - https://wartarakyat.co.id/2022/10/18/dinsos-susun-program-gerdam-kepri-untuk-pengentasan-kemiskinan/ - https://detak.media/2022/10/18/penanggulangan-

				kemiskinan-dinsos-kepri-gagas-program-gerdam-kepri/https://deltakepri.co.id/disetujui-gubernur-dinsos-kepri-entaskan-kemiskinan-dengan-program-gerdam/
12.	Masyarakat Kurang Mampu	Memiliki peranan, pengaruh akan tetapi secara tidak langsung dalam perubahan	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	

Untuk mengetahui pengaruh dan daya dukung dalam implementasi proyek perubahan maka masing-masing stakeholders perlu diidentifikasi dan dianalisa dari sisi pengaruh, dukungan, dan tingkat kepentingannya. Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya stakeholders di bedakan sebagai berikut :

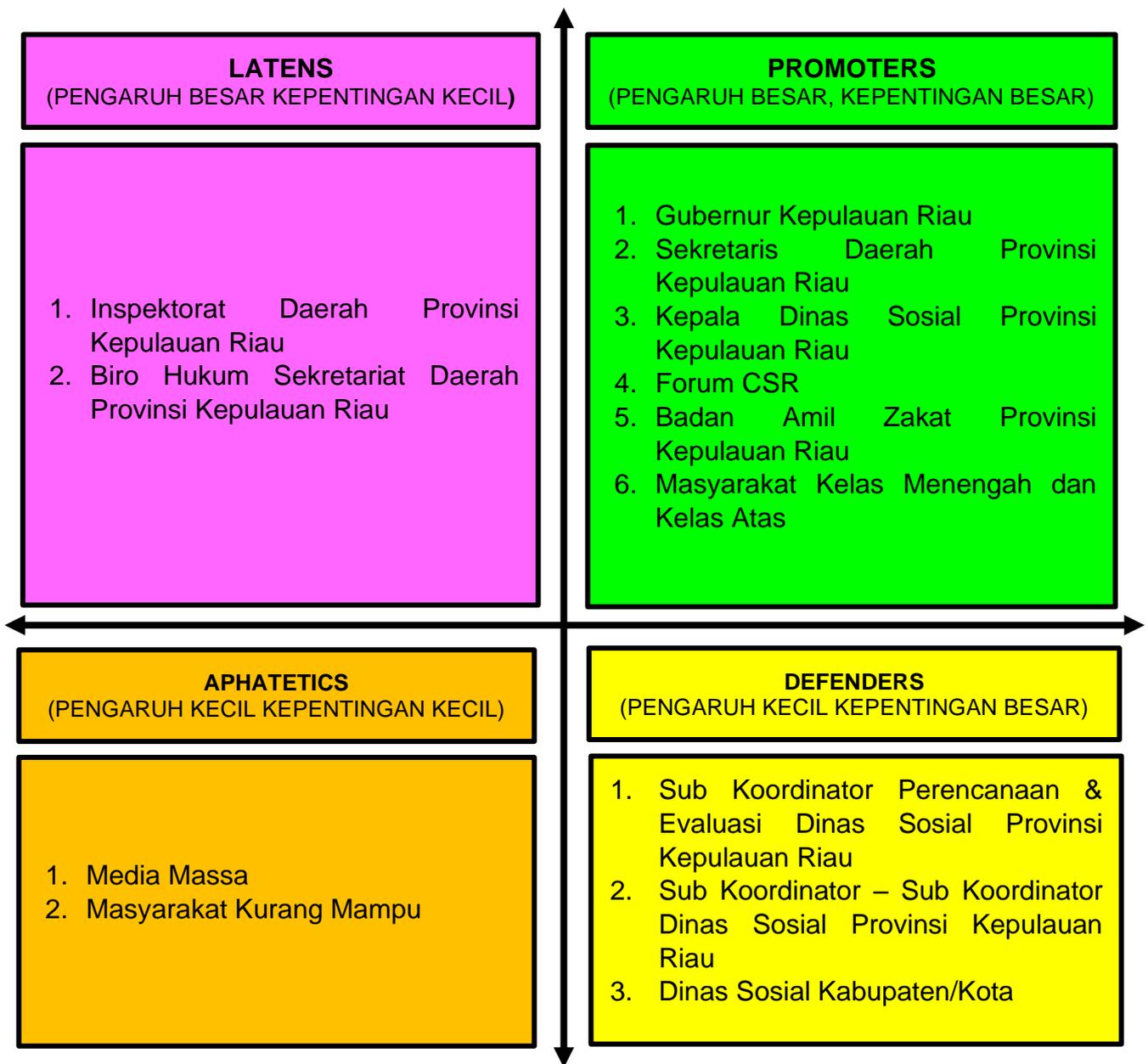
Promotors yaitu memiliki kepentingan besar terhadap proses perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil. Stakeholders yang tinggi tingkat kepentingan dan pengaruhnya.

Defenders yaitu memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyalurkan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan. Yakni stakeholders yang tinggi kepentingan namun pengaruhnya kecil.

Latens yaitu tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka tertarik. Stakeholders yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingannya rendah.

Apethetics yaitu kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya aksi perubahan, yakni stakeholders yang rendah pengaruh maupun kepentingannya.

Adapun peta manfaat dalam sumber daya yang akan digunakan dalam menyusun Aksi Perubahan ini adalah melakukan sinergitas atau jejaring sosial antar stakeholder yang saling memiliki kekuatan dan kepentingan sebagai faktor dalam pelaksanaan dan implementasinya, adalah sebagai berikut:

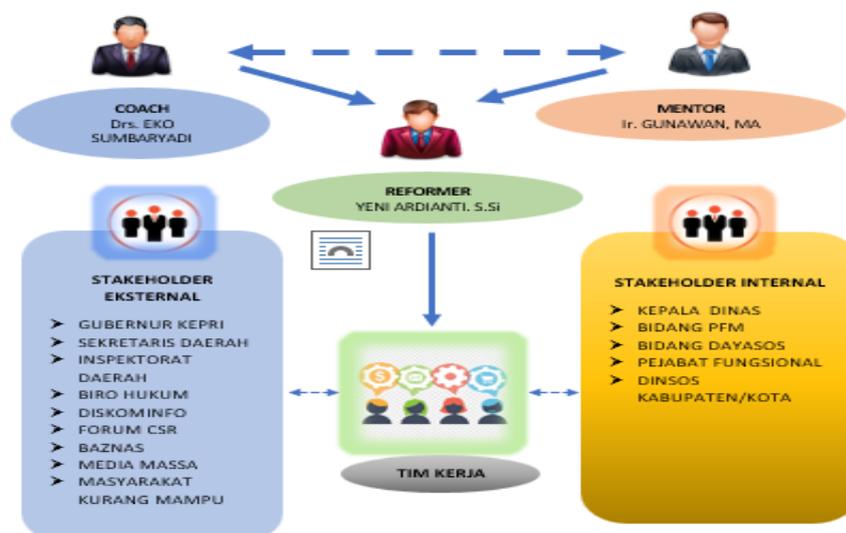


Gambar 1. Pemetaan Stakeholder

Dengan memetakan stakeholders dari sisi pengaruh, kepentingan, dan dukungannya, maka agar pelaksanaan proyek perubahan perlu dibangun strategi komunikasi dengan masing-masing stakeholders sebagai berikut:

1. Terbuka; Kunci pertama untuk menciptakan komunikasi yang efektif adalah dengan transparansi, informatif dan jujur dalam berkomunikasi.
2. Terstruktur; Komunikasi yang terstruktur dapat dipresentasikan dalam cara yang menarik agar mudah dimengerti oleh audiens.
3. Bersemangat; Komunikasi harus dikemas dengan nuansa yang bersemangat untuk memastikan audiens segera bertindak setelah menerima pesan.
4. Seimbang; Untuk menciptakan komunikasi yang efektif dengan mengatur frekuensi pesan. Komunikasi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kebingungan dan frustrasi. Di sisi lain, komunikasi yang terlalu sering akan menyebabkan sikap apatis.
5. Profesional; Komunikasi harus dikemas secara profesional. Pesan yang dibuat dengan baik dan tanpa kepentingan pribadi akan lebih efektif dan efisien.
6. Wording; Pemilihan kata yg tepat akan menjadikan komunikasi lebih efektif.

Dalam penerapannya, strategi komunikasi dapat dikombinasikan antara satu dengan yang lain dengan mempertimbangkan pihak-pihak dimana komunikasi dilakukan. Agar dalam pelaksanaan aksi perubahan berjalan efektif dan sesuai rencana maka diperlukan Tim yang efektif. Untuk itu perlu dibentuk Tim Aksi Perubahan, dengan sub-sub Tim sesuai spesialisasi bidang garap. Tim Aksi Perubahan Tampak dalam struktur berikut :



Gambar 2. Model Struktur Tim Rancangan Aksi Perubahan

Beberapa potensi masalah yang mungkin timbul dan akan menghambat kelancaran atau keberhasilan untuk mencapai target dan tujuan aksi perubahan beserta langkah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut :

No	Kendala	Solusi
1	Terjadinya mutasi jabatan atau rotasi dalam masa aktualisasi aksi perubahan	Komitmen dengan semua stakeholders agar tetap bersedia berperan dalam aktualisasi aksi perubahan, berkoordinasi dengan pejabat baru agar aksi perubahan dapat berjalan sesuai jadwal
3	Koordinasi dengan stakeholder baik internal maupun eksternal yang kurang optimal karena masing-masing stakeholder mempunyai jadwal kegiatan yang sudah menjadi tugas pokok fungsinya	Melakukan pendekatan secara intensif kepada stakeholder dan memberitahukan setiap kegiatan aksi perubahan yang akan dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya
4	Pelaksanaan aksi perubahan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan lain yang sudah terencana	Penjadwalan ulang kegiatan agar seluruhnya dapat berjalan sesuai rencana

4. Strategi Pengembangan Kompetensi

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran OPD akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka definisi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Yang terdapat dari latar belakang dan analisis di atas, maka pembekalan materi selama mengikuti kepemimpinan administrator, serta mengadopsi kesimpulan studi lapangan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di antaranya bahwa sebuah inovasi tidak harus berangkat dari issue yang spektakuler, maka rencana aksi perubahan yang akan kami laksanakan adalah Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri.

Dengan inovasi ini diharapkan memberikan ruang orientasi semangat memberikan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu menerima manfaat dari Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri, dengan penyediaan fasilitas, kompetensi, dan penugasan pegawai yang tepat untuk mendukung program tersebut.

Tabel 5. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kepri

Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kemandirian PPKS melalui pengembangan potensi diri, bantuan ekonomi produktif, bantuan stimulan, dan bantuan kebutuhan pokok.	1. Peningkatan kemandirian PPKS difokuskan pada pengembangan potensi PPKS dan bantuan ekonomi produktif;
	2. Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Meningkatkan jangkauan dan pemerataan penanganan PPKS berdasarkan data permasalahan yang ada.	1. Penanganan fakir miskin secara proporsional di wilayah perdesaan dan perkotaan, serta wilayah pesisir, perbatasan, dan pulau-pulau kecil;
	2. Penanganan PPKS secara proporsional di daerah kabupaten/kota berdasarkan data permasalahan yang ada.
3. Melaksanakan refungsionalisasi PPKS melalui rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS).	Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan tunasosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.

Strategi	Kebijakan
4. Menjamin keterpenuhan kebutuhan dasar PPKS yang memenuhi persyaratan melalui asuransi kesejahteraan sosial dan/atau bantuan langsung berkelanjutan.	Pemenuhan kebutuhan SDM Nonaparatur Askesos dan Program Keluarga Harapan (PKH).
5. Menyediakan sarana-prasarana utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Penyediaan sarana-prasarana difokuskan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) serta perlindungan sosial korban bencana.
6. Memberikan perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pemulihan trauma.	Pemenuhan kebutuhan tenaga psikososial pada saat bencana dan pascabencana.
7. Memperkuat kapasitas PSKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial dan penguatan kelembagaan sosial.	1. Peningkatan profesionalisme penyuluh sosial melalui diklat dan bimbingan teknis.
	2. Penguatan kelembagaan sosial melalui pembinaan dan pemberian bantuan operasional.
8. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, tata laksana, monev, pelaporan, dan koordinasi.	1. Pemutakhiran data PPKS dan PSKS secara periodik.
	2. Pemenuhan kebutuhan standar operasional prosedur (SOP) dalam berbagai pelaksanaan aktivitas kedinasan PD.

Strategi	Kebijakan
	3. Perluasan cakupan permasalahan yang menjadi sasaran monev, dan pembuatan instrumen monev yang terukur.
	4. Perbaiki mekanisme pengawasan internal bulanan terhadap capaian kinerja dan keuangan PD.
	5. Pengintensifan koordinasi lintas sektor dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
9. Meningkatkan kualitas SDM aparatur kesejahteraan sosial.	1. Penjalinan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur kesejahteraan sosial.
	2. Peningkatan profesionalisme aparatur kesejahteraan sosial melalui pelatihan, bimtek, dsb.

B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

1. Capaian dan Perbaikan Kinerja Organisasi

Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Perkembangan masalah sosial seperti anak terlantar, penyandang cacat, lanjut usia terlantar, korban bencana alam maupun bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pekerja pada sektor informal dan angka kemiskinan yang cukup tinggi serta maraknya penipuan di masyarakat yang berkedok undian di Provinsi Kepulauan Riau, membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius oleh pemerintah bersama-sama masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kinerja organisasi mengisyaratkan bahwa penilaian kinerja sesungguhnya sangat penting untuk melihat sampai sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditempuh usaha-usaha melalui perbaikan kinerja organisasi dan kinerja pegawai aparatur, baik melalui kepemimpinan dari atasan langsung maupun pelaksanaan dari para staf yang ada didalam bagian itu sendiri, agar segala dampak negatif dari kegiatan pengelolaan pemerintahan dapat dihindarkan serta dampak positifnya dapat ditingkatkan.

Evaluasi dapat menentukan bagaimana hasil kerja yang sesuai atau tidaknya dengan sasaran yang diharapkan dan seberapa jauh efisiensi dari tim yang mengerjakan kegiatan tersebut. Aksi perubahan ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mendapat gambaran yang jelas mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target dan menjawab tuntutan visi, misi, sasaran serta tujuannya.

Dalam melakukan evaluasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa indikator menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi tersebut :

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 s/d 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin;	Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	30,90	32,14
2. Meningkatnya fungsi sosial PPKS dalam kehidupan bermasyarakat	1. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;	%	100,00	100,00
	2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;	%	100,00	100,00
	3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;	%	100,00	100,00
	4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;	%	100,00	100,00
	5. Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	%	100,00	100,00
3. Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan,	1. Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan	%	2,98	13,33
	2. Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial	%	4,80	70,00

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal	3. Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	-	33,33
4. Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00
5. Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan organisasi.	1. Nilai akuntabilitas kinerja;		BB	BB
	2. Persentase ASN yang mencapai nilai prestasi kerja sangat baik;	%	90,00	99,00
	3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		-	90,00

Sebagai pelayan bagi masyarakat, tak jarang apa yang ingin dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan OPD yang dimilikinya harus bisa bersinergi dalam mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik dan tentu ini semua yang ingin diharapkan oleh masyarakat. Maka dalam rangka mencapai semua hal tersebut, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dengan masing-masing OPD yang dimilikinya mencoba memanfaatkan dan mengoptimalkan segala sumber kekuatan seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam dan semua sumber daya yang bisa membangun kemajuan daerah.

Tercapainya kegiatan merupakan salah satu bentuk tujuan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh penulis kegiatan yang dilakukan berdasarkan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dan teknis kegiatan.

2. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Aksi Perubahan bagi Internal Organisasi

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Sosial. Dengan adanya program GERDAM diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan inspirasi kepada semua pegawai untuk selalu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
- Meningkatnya kinerja Dinas Sosial. Kualitas kinerja yang dimaksud adalah ukuran kecepatan proses pembuatan surat, kerapian dalam pengarsipan, dan perbaikan teknik komunikasi serta respon oleh operator di Dinas Sosial
- Berubahnya pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja ASN di Dinas Sosial. Program GERDAM Kepri menumbuhkan kepedulian pada masyarakat tidak mampu dan ekonomi yang kekurangan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Memudahkan pimpinan dalam rangka pemantauan program dan kegiatan yang sedang dilakukan.
- Memudahkan sistem pelaporan dan dokumentasi sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja serta kualitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
- Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
- Terciptanya suatu SOP yang lebih baik dan jelas alur kegiatannya sehingga memudahkan semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam program GERDAM KEPRI.

2) Manfaat Aksi Perubahan bagi Eksternal Organisasi

- Menyediakan wadah yang legal bagi masyarakat kelas menengah dan kelas atas serta dunia usaha untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Memperluas cakupan kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan.
- Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah.

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan standar pelayanan maksimal yang meyakinkan masyarakat bahwa ada komitmen terus menerus dalam pelaksanaan kegiatan. Masyarakat juga akan makin yakin di masa-masa mendatang tidak menutup kemungkinan adanya inovasi-inovasi lainnya di sisi pelayanan

3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Sesuai dengan hasil identifikasi permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan utama yang akan dilakukan melalui Aksi Perubahan ini adalah kegiatan menumbuhkan kepedulian pada masyarakat tidak mampu dan ekonomi yang kekurangan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dengan ini kami mengajukan Kegiatan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Diharapkan dengan adanya kepedulian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan yang dikemas dalam Kegiatan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini, dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Persoalan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan permasalahan kemiskinan lainnya akan sedikit berkurang dengan adanya program GERDAM Kepri.

Selanjutnya untuk dapat merealisasikan program GERDAM Kepri di Provinsi Kepulauan Riau, perlu adanya kegiatan implementasi atau tindakan, dalam pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dalam bentuk *Milestone* agar aksi perubahan dapat berjalan dengan lancar. *Milestone* adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam manajemen proyek untuk mempermudah estimasi waktu penyelesaian pengerjaan sehingga dengan adanya *milestone* para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan durasi atau waktu yang ditentukan.

a. Milestone

Persiapan Implementasi Aksi Perubahan

1. Penjelasan Aksi Perubahan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Kegiatan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri, dilaksanakan pertemuan penjelasan aksi perubahan dengan seluruh ASN di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, yang juga diikuti oleh para pendamping PKH, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial. Dalam pertemuan ini disampaikan bahwa aksi perubahan yang akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kegiatan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri, yaitu suatu gerakan yang mendorong dan memfasilitasi masyarakat kelas menengah dan kelas atas serta dunia usaha untuk secara kolaboratif membantu masyarakat kurang mampu di Provinsi Kepulauan Riau.

Diharapkan bantuan dan peran serta seluruh unsur terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau demi suksesnya pelaksanaan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri. Bagi pemerintah yang berdomisili di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka diharapkan dapat menjadi pelopor dan penggerak kegiatan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri.

Penjelasan aksi perubahan ini penting dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang sama, akan pentingnya gerakan ini dapat membantu masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini merupakan implementasi dari agenda Kepemimpinan Transformational, yaitu sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi.

Tabel 7. Capaian Milestone Implementasi Aksi Perubahan

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Tempat	Hasil/Output	Evidence
1.	Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan	1. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor	8 September 2022	Ruangan kerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Tersampainya kepada Mentor tentang rencana pelaksanaan aksi perubahan termasuk rencana pembentukan Tim Efektif	- Dokumentasi - Surat Dukungan Kepala Dinas
		2. Breafing dengan unit kerja/staf membangun komitmen aksi perubahan	8 September 2022	Ruangan Rapat kerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Terbangunnya komitmen dukungan dari unit kerja/staf untuk melaksanakan aksi perubahan	- Dokumentasi - Undangan - Notulen - Absensi
		3. Rapat Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan	9 September 2022	Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Terbentuknya Tim Efektif Implementasi Aksi Perubahan yang dituangkan dalam Draft SK	- Dokumentasi - Legalitas SK Tim Efektif
2.	Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya	20 September 2022	Ruang Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Kepulauan Riau	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan	- Surat Dukungan

		Provinsi Kepulauan Riau terkait rancangan Peraturan Gubernur			Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	
3.	Penyusunan rancangan SOP	1. Rapat Internal Kantor Penyusunan rancangan Alur Proses SOP	21 September 2022	Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	<p>Terbahasnya rencana tahapan aksi perubahan SOP :</p> <p>a. Mekanisme Penyediaan Data Kelompok Sasaran Yang Perlu Dibantu Oleh Donatur Perseorangan Dan Dunia Usaha</p> <p>b. Mekanisme pengumpulan dana dari para donatur perseorangan</p> <p>c. Mekanisme penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi - Undangan - Notulen - Rancangan dan Draf SOP
		2. Melakukan penyusunan rancangan SOP Mekanisme	22 September 2022	Ruangan Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	<p>Terbahasnya Di dalam rapat tersebut, kami membahas butir-butir yang perlu dicantumkan dalam rancangan SOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi - Tampilan final SOP Mekanisme

		GERDAM KEPRI			GERDAM KEPRI : a. Mekanisme Penyediaan Data Kelompok Sasaran Yang Perlu Dibantu Oleh Donatur Perseorangan Dan Dunia Usaha b. Mekanisme pengumpulan dana dari para donatur perseorangan c. Mekanisme penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran	
4.	Penyusunan dan rancangan Pergub GERDAM Kepri	1. Melaksanakan rapat koordinasi internal penyusunan rancangan Pergub	23 September 2022	Ruangan Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Di dalam rapat tersebut, kami meminta peserta rapat memberi masukan sesuai dengan tupoksi terkait hal-hal yang harus di tetapkan dalam rancangan Pergub GERDAM Kepri	- Dokumentasi - Undangan - Notulen - Draf Pergub
		2. Konsultasi dengan Mentor, Kepala Dinas Sosial,	26 September 2022	Ruangan kerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan	Terbahasnya Progres penyusunan rancangan Pergub Pedoman Umum Pelaksanaan	- Dokumentasi - Konsep alur proses Pergub pelaksanaan

		Bapak Drs. Eko Sumbaryadi terkait draf rancangan Pergub		Riau	Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri)	GERDAM Kepri
		3. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur	27 September 2022	Ruangan Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Terbahasnya Di dalam rapat tersebut, kami membahas butir-butir yang perlu dicantumkan dalam rancangan Pergub dan mencermati semua kebutuhan yang harus di tetapkan dalam rancangan Pergub	- Dokumentasi - Tampilan final Pergub GERDAM Kepri
5.	Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal	1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait rancangan Peraturan Gubernur	28 September 2022	Ruang Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Membangun komunikasi untuk bekerjasama dan akan mendukung ke dalam Tim Koordinasi pelaksanaan Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)	- Dokumentasi - Surat Dukungan

		2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum terkait rancangan Peraturan Gubernur	04 Oktober 2022	Ruangan Kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Biro Hukum (Bapak Kuntum Purnomo) menyambut baik dan mengharapkan serta menekankan agar Regulasi yang dijadikan dasar hukum penyusunan rancangan Pergub tidak lupa dicantumkan	- Dokumentasi - Berita Acara
6.	Pembuatan Website Program GERDAM Kepri	1. Rapat Tim Efektif Pembuatan Website program GERDAM Kepri	05 Oktober 2022	Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Terbahasnya rencana tahapan aksi perubahan Pembuatan Website program GERDAM Kepri	- Konsep alur proses Website
		2. Rapat Tim Efektif membahas final Pembuatan Website program GERDAM Kepri	06 Oktober 2022	Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Selesaiya Pembuatan Website program GERDAM Kepri	- Tampilan final website
7.	Penetapan Peraturan Gubernur	Tersusunnya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau yang mengatur mekanisme pelaksanaan program	13 Oktober 2022	Ruang Kerja Gubernur Kepulauan Riau	Tersusunnya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau	- Tampilan Selesaiya Pergub Nomor 57 Tahun 2022

		GERDAM Kepri				
8.	Penetapan SOP	Tersusunnya SOP yang mengatur mekanisme pelaksanaan program GERDAM Kepri	14 Oktober 2022	Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	<p>Terbahasnya konsep Final SOP melalui GERDAM Kepri :</p> <p>a. Mekanisme Penyediaan Data Kelompok Sasaran Yang Perlu Dibantu Oleh Donatur Perseorangan Dan Dunia Usaha</p> <p>b. Mekanisme pengumpulan dana dari para donatur perseorangan</p> <p>c. Mekanisme penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tampilan Selesaiya Mekanisme Peyusunan SOP
9.	Melaksanakan sosialisasi Eksternal	1. Rapat sosialisasi Dengan Dinas Sosial Se Kabupaten/Kota	17 Oktober 2022	Zoom Meeting	Terbahasnya Kosep alur proses Pelaksanaan Program GERDAM Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi - Undangan - Notulen - Konsep alur proses pelaksanaan Program GERDAM Kepri

		2. Sosialisasi Pergub GERDAM Kepri dengan Sekda Kota Tanjungpinang	17 Oktober 2022	Tanjungpinang	Terbahasnya Kosep alur proses Pelaksanaan Program GERDAM Kepri	- Dokumentasi
		3. Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi Program GERDAM Kepri dengan Baznas Prov. Kepri	18 Oktober 2022	Kantor Baznas Provinsi Kepulauan Riau	Menjelaskan mekanisme penyediaan data kelompok sasaran yang perlu dibantu oleh donatur perseorangan dan dunia usaha, mekanisme pengumpulan dana dari para donatur, dan mekanisme penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran	- Dokumentasi - Konsep alur proses - pelaksanaan Program GERDAM Kepri
		4. Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi Program GERDAM Kepri dengan Bank Riau Kepri Syariah.	18 Oktober 2022	Ruang Kerja Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Menjelaskan mekanisme penyediaan data kelompok sasaran yang perlu dibantu oleh donatur perseorangan dan dunia usaha, mekanisme pengumpulan dana dari para donatur, dan mekanisme penyaluran bantuan	- Dokumentasi - Konsep alur proses - pelaksanaan Program GERDAM Kepri

					kepada kelompok sasaran	
		5. Menginformasikan aksi perubahan tentang Program GERDAM Kepri Media Online	19 Oktober 2022	Media Online Harian Kepri	Menjelaskan mekanisme penyediaan data kelompok sasaran yang perlu dibantu oleh donatur perseorangan dan dunia usaha, mekanisme pengumpulan dana dari para donatur, dan mekanisme penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran	- Dokumentasi - Konsep alur proses pelaksanaan Program GERDAM Kepri
		6. Dialog interaktif dengan RRI Tanjungpinang terkait aksi perubahan GERDAM Kepri	20 Oktober 2022	RRI Tanjungpinang	Menjelaskan mekanisme penyediaan data kelompok sasaran yang perlu dibantu oleh donatur perseorangan dan dunia usaha, mekanisme pengumpulan dana dari para donatur, dan mekanisme penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran	- Dokumentasi - Konsep alur proses pelaksanaan Program GERDAM Kepri
		7. Dialog interaktif dengan dengan TV Tanjungpinang	21 Oktober 2022	TV Tanjungpinang	Menjelaskan mekanisme penyediaan data kelompok sasaran yang perlu dibantu oleh	- Dokumentasi - Konsep alur proses pelaksanaan

		terkait aksi perubahan tentang Program GERDAM			donatur perseorangan dan dunia usaha, mekanisme pengumpulan dana dari para donatur, dan mekanisme penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran	Program GERDAM Kepri
		8. Membentuk WaG Tim Teknis dan Donatur GERDAM Kepri	31 Oktober 2022	Tanjungpinang	Membentuk komunitas yang berkolaborasi untuk saling membantu menyukseskan program GERDAM KEPRI sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan	- Dokumentasi

C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

1. Tindak lanjut Kegiatan Jangka Pendek Dengan Menetapkan Target Capaian Jangka Menengah Dan Jangka Panjang

Dengan telah dilaksanakannya aksi perubahan yang merupakan kegiatan jangka pendek selama 2 (dua) bulan sejak awal September sampai awal November maka tujuan jangka pendek telah dilaksanakan. Untuk tindak lanjut berikutnya adalah merealisasikan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang dari aksi perubahan ini yang belum terwujud. Tahapan yang akan dicapai dengan aksi perubahan ini yaitu :

1. Tujuan Jangka Menengah : 6 (enam) Bulan
 - Tersosialisasikannya program GERDAM Kepri di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan sehingga kearifan lokal seperti gotong royong dapat tumbuh Kembali di masyarakat.
 - Meningkatnya jangkauan program penanggulangan kemiskinan pada kelompok sasaran yang lebih luas.
2. Tujuan Jangka Panjang :1 (Satu) Tahun Keatas
 - Tersusunnya Peraturan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau tentang program GERDAM sehingga menjadi payung hukum bagi semua Kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan
 - Menurunnya angka kemiskinan dan terpeliharanya kearifan lokal seperti gotong royong didalam masyarakat Kepulauan Riau.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GERDAM Kepri.

D. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan Dalam Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan

1. Diagnosa Organisasi

Pembelajaran Diagnosa Organisasi relevan dan bermanfaat bagi peserta sendiri dan antar peserta PKA dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pejabat Administrator yang diberi tanggung jawab dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembanguan yang dilakukan para pelaksana di bawahnya. Untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas atau prima, maka secara berkala peserta harus melakukan diagnosa permasalahan pelayanan publik di unit organisasi dan merumuskan upaya-upaya perbaikannya. Tanpa kompetensi mendiagnosa tersebut, dikhawatirkan, para pejabat administrator dapat salah menilai kualitas pelayanan publiknya. Dia menganggap sudah baik, padahal kebutuhan dan tuntutan untuk peningkatan kualitas pelayanan akan terus muncul.

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosa seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasinya dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Pengertian Isu strategis dalam modul ini, adalah berita atau informasi yang sering dibicarakan namun belum jelas dan. Agar isu menjadi jelas dan dapat disebut masalah, maka perlu dicari kebenarannya, perlu dibuktikan dengan data/informasi yang akurat. Suatu isu disebut strategis, karena terkait dengan dan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi tertentu. Kemudian, isu yang sudah terbukti atau didukung dengan data/informasi yang akurat menjadi atau disebut masalah.

Diagnosa organisasi dapat diartikan sebagai mendiagnosa atau menilai tingkat fungsi organisasi saat ini untuk merancang intervensi perubahan yang tepat (organizational diagnosis, involves diagnosing or assessing an organization's current level of functioning in order to design appropriate change interventions) (LAN, 2014).

Apa yang dinilai? Fungsi-fungsi organisasi atau bagian-bagian organisasi yang dinilai untuk menemukan fungsi-fungsi mana saja yang bermasalah sebagai acuan untuk merumuskan solusi yang tepat.

“Organisasi yang strategi, tujuan, dan operasi internalnya terus menerus sejalan dengan tuntutan lingkungan eksternalnya untuk rangka memaksimalkan kinerja organisasi”

Manfaat mendiagnosa organisasi :

- memahami permasalahan organisasi/unit organisasinya sehingga lebih percaya diri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik (continuous improvement, better performance).
- mempunyai argumentasi yang kuat untuk menyakinkan para pemangku kepentingan (stake holders) termasuk pimpinan di atasnya tentang rencana perubahannya.

Prinsip-prinsip diagnosa organisasi :

- Berdasarkan analisa yang logis
- Menggunakan kemampuan berpikir kreatif
- Belajar dari berbagai pengalaman
- Analisa dalam batas ruang lingkup aktivitas organisasi/unit organisasi
- Memudahkan penyusunan rencana perubahan

Tacit knowledge adalah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman individu (individual context) diri sendiri atau dari orang lain dan tempatnya bekerja, yang kemudian diadopsi menjadi pengetahuannya, dan diberikan kembali ke lingkungan (shared context).

Kriteria risiko pada pengadaan tahap perencanaan dan persiapan, termasuk di dalamnya risiko yang terkait dengan kondisi barang/jasa atau produk yang menjadi objek pengadaan. Risiko pada tahap pelaksanaan pengadaan (pemilihan penyedia) termasuk di dalamnya risiko yang terkait dengan kondisi penyedia barang/jasa sedangkan pada tahap pelaksanaan kontrak termasuk di dalamnya risiko terkait dengan kondisi pihak pengelola dan para pihak yang terlibat.

Tujuan mendiagnosa organisasi adalah menemukan secara tepat permasalahan dalam organisasi termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya.

Permasalahan organisasi tidak hanya dirasakan oleh pimpinan dan pegawai (internal) organisasi dan juga yang dirasakan pihak eksternal (pandangan mitra kerja, klien, atau stakeholders lainnya). Karena itu, diagnosa organisasi seringkali juga memerlukan pandangan dari para mitra kerja eksternal organisasi tersebut, melalui metode wawancara atau mengirimkan kuesioner.

2. Manajemen Pemerintahan

Menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat kita praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Sering kita menyampaikan kata kata tersebut tanpa diketahui maknanya. Management berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien. Terry (1973) menjelaskan “management is performance of conceiving and achieving desired results by means of group efforts consisting of utilizing human talent and resources”. Proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Hersey dan Blanchard (1988) mengemukakan “management is a process of working with and through individuals and groups and other resources to accomplish organizational goals”. Proses Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi, selanjutnya seorang ahli manajemen yang dianggap berpengaruh, Mary Parker Follet mendefinisikan tentang manajemen yaitu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, rumusan ini sangat mudah untuk dipahami dan simpel.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, jika digeneralisasi dapat dilihat dari tiga pengertian, yaitu:

1. Manajemen sebagai proses;
2. Manajemen sebagai kolektivitas manusia;

3. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art).

Adapun fungsi fungsi manajemen yang bersifat umum dan berlaku dalam manajemen pemerintahan sebagai contohnya adalah menurut apa yang diungkapkan oleh Dalton E Mc Farland, yang mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 3 (tiga), yang disingkat dengan akronim POCO, yaitu Planing (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Controlling (Pengawasan). Selanjutnya Geoge Terry, mengemukakan fungsi manajemen ada 4 (empat), disingkat dengan akronim POAC, yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (penggerakan), Controlling (pengawasan). Selanjutnya akan diuraikan fungsi pokok manajemen sebagai berikut :

1. Planning (perencanaan)

Terdapat 3 unsur pokok kegiatan perencanaan, yaitu: 1) pengumpulan data, 2) analisis fakta dan, 3) penyusunan rencana yang konkrit

2. Organizing (pengorganisasian)

Sebuah organisasi terdiri dari beberapa unsur, yaitu : (1) ada kumpulan orang orang (2) ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam organisasi (3) bekerjasama di mana aktivitas-aktivitas yang terpisah dikoordinir (4) ada tujuan bersama yang akan dicapai melalui kerjasama yang terkoordinir.

3. Actuating (penggerakan)

Menjelaskan dan mengkomunikasikan tujuan yang hendak di capai. (2) Menyenggarakan pertemuan yang dapat menstimulus kerja bawahan. (3) Mengajak untuk bekerja semaksimal mungkin guna mencapai standar operasional. (4) Mengembangkan potensi guna merealisasikan kemungkinan hasil yang maksimal.

4. Controlling (pengawasan)

Pengawasan sebagai proses terdiri atas tiga langkah universal, yaitu (1) mengukur perbuatan (2) membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada, dan (3) memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka

Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

3. Pembangunan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. "Tujuan utama dari peraturan-peraturan ini adalah untuk menciptakan kemudahan berbisnis tanpa mengurangi standar, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan,"

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam (SDA)
2. Sumber daya manusia (SDM)

3. Akumulasi modal
4. Tenaga manajerial dan organisasi produksi
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Faktor politik dan administrasi pemerintah
7. Aspek sosial budaya.

Pembangunan ekonomi akan memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dampak Negatif: Pembangunan ekonomi dapat mengancam habitat alam karena pembukaan lahan untuk meningkatkan perekonomian.

4. Pengadaan Barang dan Jasa

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan Barang/ Jasa dan anggaran pengadaan. Dari sisi cara pengadaan, dibedakan antara Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola dan Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia. Hasil perencanaan pengadaan dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Perencanaan Pengadaan menjadi masukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran K/L dan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan.

Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBD, dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD.

Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBN dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA K/L atau untuk APBD dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA Perangkat Daerah. Penyusunan dan/atau perubahan perencanaan pengadaan akibat dari perubahan strategi pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan.

Identifikasi kebutuhan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, meneliti, serta mencatat data dan informasi akan kebutuhan barang/jasa yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada Renja K/L atau Renja PD. Data dan informasi tersebut selanjutnya direviu, untuk mengulas kekurangan, kelebihan, manfaat, bentuk fisik, harga, komponen, dan hal-hal lain terhadap suatu barang/jasa. Identifikasi kebutuhan barang/jasa secara umum dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Prinsip efisien dan efektif.
- 2) Aspek pengadaan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan)
- 3) Penilaian prioritas kebutuhan
- 4) Barang/jasa pada katalog elektronik
- 5) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
- 6) Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai

Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan prinsip dan etika pengadaan. Strategi pengadaan yang ditetapkan diturunkan dalam bentuk pemaketan dan cara Pengadaan Barang/Jasa. Setiap paket tersebut kemudian perlu ditetapkan cara pengadaan, yakni cara memperoleh barang/jasa, baik yang dilakukan sendiri (swakelola) ataupun yang disediakan oleh penyedia, termasuk dalam hal ini adalah penjadwalan pengadaan.

1) Perumusan Strategi Pengadaan

Untuk menerapkan suatu strategi yang tepat dalam Pengadaan Barang/Jasa, setiap K/L/PD harus mengetahui dengan tepat jenis kebutuhan dan besaran belanja masing-masing jenis barang/jasa yang dibutuhkan. Barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh satker dapat dikelompokkan berdasarkan manfaat barang/jasa dalam menunjang upaya pencapaian target kinerja instansi. Perumusan strategi dilakukan berdasarkan beberapa kelompok/ kategori yaitu:

- a. Strategi yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan kebijakan pengadaan.

- b. Strategi berdasarkan proses pada tahap perencanaan.
 - c. Strategi berdasarkan kategori barang/jasa model Supply Positioning Model (routine, leverage, bottleneck, dan critical).
- 2) Strategi Berdasarkan Tujuan dan Kebijakan PBJP berdasarkan tujuan dan kebijakan tersebut dapat disusun contoh beberapa strategi PBJP.
 - 3) Strategi Berdasarkan Proses Pada Tahap Perencanaan PBJP Berdasarkan lingkup perencanaan pengadaan dapat disusun strategi operasional PBJP
 - 4) Berdasarkan Supply Positioning Model Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah strategi pengadaan yang tepat dengan membagi pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelompok pemaketan yang sesuai dengan tujuannya. Dengan mengelompokkan dalam bentuk paket ini maka akan diketahui jenisnya, nilainya, kompleksitasnya, risikonya, penyediannya banyak atau terbatas, tersedianya barang substitusi atau tidak, bisakah barang diadakan sendiri, dll. Pengelompokan barang kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan analisis berdasarkan Supply Positioning Model. Supply Positioning Model adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengadaan pada suatu satker/instansi sehingga dapat ditentukan prioritas Pengadaan Barang/Jasa. Supply Positioning Model (SPM) adalah suatu model yang dikembangkan oleh Peter Kraljic untuk mengkategorikan barang dan jasa berdasarkan nilai pembelian (Value of Purchase) dan besar kecilnya risiko (Level of Risk). Tujuan dari pengkategorian ini adalah untuk membantu dalam membuat skala prioritas penggunaan sumber daya dan waktu serta membantu dalam mengembangkan strategi pasokan barang/jasa. Model ini mempresentasikan dua sumbu, sumbu X dan Y.

Di dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, titik kritis terdapat pada setiap tahapan proses pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima barang/jasa, bahkan setelahnya. Titik-titik kritis tersebut harus dikenali dan diantisipasi serta dikelola risikonya, sehingga tidak berdampak negatif terhadap Pengadaan Barang/Jasa. Kemungkinan resiko di setiap titik kritis harus dianalisis dari sisi kemungkinan terjadinya serta dampaknya terhadap kinerja Pengadaan Barang/Jasa.

Dari analisis tersebut, resiko dapat dimitigasi apakah harus dihindari, dikurangi, dialihkan, atau dikelola agar daya rusaknya masih bisa ditanggulangi.

E. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan penulis kepada *stakeholder*. Diseminasi aksi perubahan bertujuan menunjukkan aksi perubahan yang sedang atau telah dilakukan untuk mendapatkan respons dari *stakeholder*. Adapun diseminasi aksi perubahan ini dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang diterapkan dalam penyusunan aksi perubahan ini ialah dengan melaksanakan rapat-rapat internal di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau untuk mengetahui respons dan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari *stakeholder* internal.

- a. Pelaksanaan Rapat Persiapan Internal Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Aksi Perubahan Aksi Perubahan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (Gerdam Kepri).



Gambar 3. Rapat Persiapan Internal Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

- b. Rapat Melaksanakan pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Aksi Perubahan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (Gerdam Kepri).

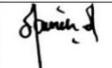
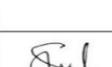


Gambar 4. Rapat Melaksanakan pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan

- c. Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan Penerapan Aksi Perubahan berjudul Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM KEPRI).

No	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan	Testimoni	Tanda Tangan
1	Drs. Eko Sumbaryadi	19631117 199103 1 013	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Dinas	Program GERDAM Kepri sangat dibutuhkan sebab dapat mendorong golongan mampu untuk secara kolaborasi membantu masyarakat kurang mampu.	
2	Hj. Harizar, Spd,Ind	19670630 198803 2 007	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kabid. Linjamsos	Aksi perubahan ini inovatif karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.	
3	Hj.Siti Maryam S.Sos	19650808 198603 2 024	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kabid. Rehsos	Saya sangat berterimakasih karena telah ada inovasi GERDAM Kepri, jika program ini dilaksanakan secara berkelanjutan, akan dapat memulihkan fungsi sosial PMKS di Bidang Rehabilitasi Sosial khususnya dan Masyarakat kurang mampu di Kepulauan Riau umumnya.	
4	DR. Irwanto, S.Pd., M.Si	19720310 199303 1 009	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kabid. Penanganan Fakir Miskin	GERDAM Kepri merupakan bentuk kepedulian kita terhadap kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan mengesampingkan APBD, oleh karena itu sebagai Kabid Penanganan Fakir Miskin, saya sangat mendukung program ini.	
5	Deka Hamadya Sandi, S.STP., M.Tr.IP	19660224 200602 1 001	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kabid. Pemberdayaan Sosial	Inovasi perubahan yang ditawarkan oleh Sekretaris Dinas Sosial sangat membantu dalam menjalankan fungsi pemberdayaan sosial. Semoga program ini berhasil dan berkesinambungan.	
6	Hj. Eliya Yusma, S.Sos, MPH	19660116 198604 2 003	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelola Sumber Dana Sosial / Penyuluh Sosial Ahli Muda	saya sangat mengapresiasi program ini, saya dengan adanya GERDAM Kepri, fungsi kelembagaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dirasakan oleh kalangan menengah bawah.	

Gambar 5. Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan

7	Hj. Dawiyah Stegar, SKM., MKM.	19730910 199303 2 031	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kasi. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / Pekerja Sosial Ahli Muda	Kami sangat mendukung program Gerdam Kepri, kami siap berpartisipasi dalam hal penyediaan data komiskinan yang up to date.	
8	Mohammad Nafis Kurtubi, S.H.	19760708 201101 1 002	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kasi. Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga / Penyuluh Sosial Ahli Muda	Program ini sangat inovatif. Menjawab semua keluhan kesah pilar sosial terkait keterbatasan anggaran yang mengakibatkan terbatasnya jangkauan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di Provinsi Kepulauan Riau.	
9	Wan Risma Yeni Yastika, SE	19860108 201001 2 024	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kasi. Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetia kawan dan restorasi Sosial / Penyuluh Sosial Ahli Muda	Saya sebagai Kasi keahlawanan merasa bangga, karena dengan ada program ini, secara tidak langsung masyarakat dapat berperan menjadi pahlawan sosial dalam membantu masyarakat miskin.	
10	Fathatullah, SE	19741108 200502 1 003	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kasi. Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat / Pekerja Sosial Ahli Muda	Selama ini bantuan pengembangan ekonomi produktif kita targetkan dalam jumlah kecil karena keterbatasan APBD, semoga Gerdam Kepri dapat memperluas target pemberian bantuan usaha ekonomi produktif di Provinsi Kepulauan Riau.	
11	Apriana Meliani, S.E.	19780401 201001 2 006	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga / Pekerja Sosial Ahli Muda	Saya sangat senang dan mendukung secara penuh aksi perubahan ini karena akan memberikan dampak positif bagi keluarga yang membutuhkan bantuan.	
12	Ibu Husein, ST	19790412 201101 1 004	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	Dalam hal perencanaan, tidak dapat diungkiri bahwa kita menargetkan bantuan dalam skala kecil karena keterbatasan anggaran. Inovasi yang diberikan oleh Ibu Sekdis ini sangat membantu memperluas target penerima bantuan tanpa harus bergantung pada APBD.	
13	Muhammad Salman Al Farsi, S.STP	19930816 201507 1 002	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Program Gerdam Kepri Sangat Bagus untuk pemerintah daerah bagi masyarakat yang kurang mampu	

Gambar 6. Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan

- d. Rapat Pembahasan koordinasi internal penyusunan rancangan Pergub Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (Gerdam Kepri).



Gambar 7. Rapat Pembahasan koordinasi internal penyusunan rancangan Pergub Upaya Pengentasan Kemiskinan

- e. Rapat Konsultasi dengan Mentor Bapak Drs. Eko Sumbaryadi terkait Penerapan Program Aksi Perubahan Program GERDAM Kepri.



Gambar 8. Rapat Konsultasi dengan Mentor Bapak Drs. Eko Sumbaryadi

- f. Rapat Internal Kantor penyusunan rancangan SOP Mekanisme GERDAM Kepri.



Gambar 9. Rapat Internal Kantor penyusunan rancangan SOP

2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan.

Inovasi adalah suatu gagasan atau metode atau obyek yang dianggap baru. Menurut keterangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan (kreasi baru). Inovasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Difusi inovasi adalah suatu proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran-saluran tertentu pada saat tertentu di antara anggota-anggota suatu sistem sosial yang mencakup teknologi, produk baru dan ide-ide baru. Sedangkan Adopsi adalah suatu keputusan untuk menerapkan suatu inovasi dan untuk keberlanjutannya.

Adopsi merupakan kecepatan relatif suatu inovasi yang diadopsi oleh anggota dalam kelompok suatu sistem sosial. Adopsi biasanya diukur dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk persentase tertentu dari anggota dalam kelompok suatu sistem untuk mengadopsi suatu inovasi melalui berbagai tahapan-tahapan.

Setelah mengetahui berbagai macam inovasi dan informasi, mengenai varietas unggul baru, pemerintah memiliki sikap tertarik dan terdapat berbagai alasan berdasarkan pengalaman, harga varietas unggul baru, mudah tidaknya dalam proses GERDAM KEPRI.

Kreativitas yang diciptakan harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan sehingga terwujud program GERDAM KEPRI.

Melalui Program ini diharapkan tumbuh inovasi dan kreativitas oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan aksi perubahan program GERDAM KEPRI dalam rangka pemanfaatan pemerintah yang lebih optimal.



Gambar 10. Foto Bersama Bapak Gubernur Kepulauan Riau

F. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat atau pun usaha belajar dan kerja keras sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Setiap individu memiliki potensi diri. Namun, tidak semuanya dapat menggunakan potensi diri dengan baik. Potensi diri dapat digunakan dengan baik ketika individu mampu mengembangkan potensi dirinya.

Mengenali diri adalah salah satu hal utama yang harus dilakukan dalam hidup. Individu yang mengenali dirinya akan menemukan kekurangan dan kelebihan. Mengenali kekurangan dan kelebihan penting untuk mengelola potensi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Untuk mengembangkan potensi juga diperlukan motivasi diri yang kuat karena pengembangan potensi

diri merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap karena tidak ada individu yang langsung ahli dalam segala hal yang dikerjakannya. Semua dicapai melalui proses yang kadang cukup panjang.

Pengembangan Mandiri

1. Dengan pengembangan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan minat dan ukuran kapasitas diri yang relevan dengan target yang ingin dicapai membuat kita dapat melaksanakan pekerjaan semaksimal mungkin sehingga hasil yang dicapai memuaskan.
2. Referensi pendukung yang banyak diperoleh dalam pengembangan potensi diri yang selaras dengan minat dan kebutuhan organisasi membuat kita dapat meningkatkan kemampuan mengelola kompetensi orang lain di lingkup unit yang dipimpin sehingga dapat mengembangkan kapasitas bawahan yang kita pimpin dan membuat mereka lebih baik dalam segala hal dibandingkan sebelumnya.
3. Pengembangan potensi mampu mengasah kemampuan individu mengelola tugas atau target unit yang dipimpin dalam rangka meningkatkan sensitivitas peluang pengembangan kompetensi/pemberdayaan bawahan sehingga dapat menggali kemampuan bawahan yang dapat meningkatkan kinerja unit kerja organisasi.

Pengembangan Melalui Penugasan

1. Penugasan sebagai ketua tim satuan tugas tertentu yang terdiri atas berbagai karakter anggota dengan target jangka pendek sehingga mengasah kemampuan individu untuk membagi tugas sesuai kompetensi yang dimiliki anggota yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efisien.
2. Upaya pengembangan diri melalui penugasan pada kompetensi yang linear dengan minat karirnya sehingga pengembangan diri menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan kemampuan individu.
3. Adanya reward dan punishment pada penugasan spesifik dalam membuat tata kelola kerja/penugasan bawahan dapat mengasah penghargaan

terhadap kompetensi sehingga bawahan dapat berkompetesi secara sehat dan meningkatkan kompetensi masing-masing yang dapat menjadikan mereka lebih baik lagi. Manfaat pengembangan potensi diri untuk pemimpin:

1. Bisa digunakan sebagai pilihan alternatif dalam penyelesaian masalah.
2. Guna mengembangkan inovasi dan kreatifitas agar kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pengukuran Potensi Diri:

1. Pandangan Realistik dan Obyektif seseorang tentang dirinya sendiri
2. Merupakan usaha-usaha untuk memperluas dan memperdalam kesadaran mengenai berbagai aspek, kecenderungan dan kekhususan diri sendiri yang sudah teraktualisasi maupun yang masih merupakan potensi. (Pengenalan dan Pengembangan Potensi diri, Dharmayanti Utoyo Lubis, Phd.Psi).

Identifikasi Potensi Diri :

1. Kemampuan menggunakan fakta dasar
2. Pengetahuan profesional yang relevan
3. Kepekaan yang kontinyu terhadap suatu peristiwa
4. Keterampilan analitis, pemecahan masalah, pembuatan keputusan-keputusan , penilaian
5. Daya tahan emosi
6. Proaktif- kecenderungan menanggapi peristiwa degan maksud tertentu
7. Kreatifitas
8. Kecerdasan mental
9. Keterampilan dan kebiasaan belajar yang seimbang
10. Pengenalan diri

Tujuan dari pengembangan diri pastinya adalah membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saat kamu menjadi versi terbaik dirimu, kamu akan merasakan beragam perubahan positif dalam kehidupan secara profesional maupun personal.

Manfaat pengembang diri adalah kita akan lebih mudah membuat target dan keputusan-keputusan yang ingin kita capai di dalam hidup. Pengembangan diri membuat kita lebih fokus dalam menjalani hidup. Rasa yang terarah akan membimbing kita pada tujuan yang diinginkan.

Mampu mengembangkan potensi diri merupakan dambaan setiap individu. Mampukah seseorang mengembangkan potensi dirinya secara efektif? Itu bergantung pada motivasi diri, karena pengembangan potensi diri merupakan suatu proses yang sistematis dan bertahap. Tahapan pengembangan potensi diri tersebut antara lain melalui pengenalan dan pengukuran potensi diri, menentukan konsep diri, mengenal hambatan-hambatan serta aktualisasi diri.

Secara umum potensi diri dibedakan menjadi 5 macam, yaitu;

1. Potensi fisik, merupakan potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.
2. Potensi Mental Intelektual, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia terutama otak kiri, yang berfungsi untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis.
3. Potensi Sosial Emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak terutama otak sebelah kanan, yang berfungsi untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi dan kesadaran diri.
4. Potensi Mental Spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan diluar ego, kecerdasan ini berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia.
5. Potensi Daya Juang, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan dan daya juang, melalui potensi ini seseorang mampu mengubah rintangan dan tantangan menjadi peluang.

Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan tanpa memiliki kemampuan mengimplementasikan pengembangan potensi diri dalam kepemimpinannya.

Peran kepemimpinan yaitu peran pemimpin sebagai penentu arah, agen perubahan serta juru bicara dan pelatih. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Hubungan kedua aspek ini dapat dilihat pada perilaku pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin melaksanakan peran kepemimpinan dengan menggunakan gaya kepemimpinan. Beberapa Kompetensi yang mempresentasikan sikap dan perilaku kepemimpinan, yaitu :

1. Integritas

Seorang pemimpin harus bisa membangun sebuah hubungan dengan anggotanya yang dilandasi dengan rasa saling percaya satu sama lain. Pemimpin yang baik harus selaras antara apa yang diucapkan dan dilakukan. Dengan demikian, akan timbul rasa percaya yang tinggi dari anggota terhadap pemimpinnya. Beberapa aspek dan indikator dari integritas dapat dilihat dari:

- Tanggung jawab
- Komitmen
- Kedisiplinan
- Kejujuran
- Konsistensi
- Pengambilan Keputusan
- Dilematis



Gambar 11. Foto Bersama Tim Mendukung Aksi Perubahan

2. Kerjasama

Pemimpin hendaknya seseorang yang mudah bersosialisasi, berkomunikasi, dan jarang bersikap diam. Pemimpin harus menunjukkan energi yang positif terhadap anggotanya. Dengan begitu, hubungan antara pemimpin dan anggota akan terjalin dengan baik dan berdampak baik terhadap jalannya organisasi. Kerjasama adalah Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Beberapa aspek dan indikator dari kerjasama dapat dilihat dari :

- Kerjasama Internal
- Kerjasama Eksternal
- Komunikasi
- Fleksibilitas
- Komitmen dalam Tim



Gambar 12. Foto Bersama Staf Dinas Sosial

3. Mengelola Perubahan

Pemimpin adalah motor penggerak yang harus dapat mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan. Pemimpin harus bersikap ambisius dalam mencapai tujuannya. Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah dalam melakukan tugasnya dan selalu memperlihatkan inisiatif untuk melakukan suatu perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Beberapa aspek dan indikator dari mengelola perubahan dapat dilihat dari :

- Orientasi Pelayanan
- Adaptabilitas
- Pengembangan diri dan orang lain
- Orientasi pada hasil



Gambar 13. Foto Menjelaskan terkait PERGUB GERDAM KEPRI

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*
- Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.*
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 2022. *Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri)*. Tanjungpinang: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Republik Indonesia, 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sunyoto, Danang. 2002. *Manajemen dan Perkembangan Sumber DayaManusia*. Yogyakarta: Erlangga.

LAMPIRAN (EVIDENCE)

1. Dokumentasi koordinasi dan konsultasi dengan Mentor



 **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
DINAS SOSIAL
Jalan Sultan Masyur Syah Pulau Dompok
Email : sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. EKO SUMBARYADI**
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja/Instansi : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang dilakukan oleh **Yeni Ardianti, S.Si**, selaku Sekretaris pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dengan judul "**Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)**", yang digagas dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Saya mengapresiasi pelaksanaan aksi perubahan ini akan membantu implementasinya ke depan, khususnya dalam hal dukungan kerjasama dalam program dan kegiatan **Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)**.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,


KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL
(Drs. EKO SUMBARYADI)

SK TIM EKEKTIF AKSI PERUBAHAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL
Jalan Sultan Mansyur Syah
Email : sekretariat.dinas.sosial@provriau.go.id
TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 991/KPTS-9/IX/2022

TENTANG

TIM KERJA AKSI PERUBAHAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM GERAKAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA KEPULAUAN RIAU (GERDAM KEPRI) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dalam penyusunan Aksi Perubahan pada penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi peserta PKA Angkatan II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2022, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Tim Kerja Aksi Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1302);
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091);
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1007/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1008/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud pada Dikem KESATU dibekukan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Kerja Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud pada Dikem KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mencatat peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim;
- Menyclasskan mekanisme kerja;
- Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* terkait baik internal maupun eksternal;
- Menjelaskan sistem komunikasi antar anggota tim;

- Mendesain grafik kurva S sesuai dengan data yang telah terkumpul dari masing-masing Pusat/Bidang Terkait;
- Menyusun laporan implementasi Aksi Perubahan;
- Melakukan Publikasi dan Dokumentasi seluruh tahapan kegiatan Tim Kerja Aksi Perubahan;
- Menyampaikan laporan berkala, sewaktu-waktu dan tahunan/tahunan pelaksanaan aksi perubahan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Pembina Tim Kerja Aksi Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud pada Dikem KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 September 2022

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Drs. Eko Sumbaryadi
Utama Madya
NIP. 19631117 1991 03 1013

Sialnan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 991/KPTS-9/IX/2022
Tanggal : 9 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM GERAKAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA KEPULAUAN RIAU (GERDAM KEPRI) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. EKO SUMBARYADI	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
2.	YENI ARDANTI, S.Si	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
3.	DEKA HARMADYA SANDI, S.STP., M.Tr.I.P	Kapala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
4.	DR. IRWANTO, S.Pd., M.Si	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	IBNU HUSEIN, ST	Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	MUHAMMAD SALMAN AL FARISI, S.STP	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Drs. Eko Sumbaryadi
Utama Madya
NIP. 19631117 1991 03 1013

7. AZAKARIA	Auditor Madya Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8. FANNI OKAN PERDANA, SE	Auditor Muda Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9. DIANA NOVIANTRI, SH. MH	Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Anggota

4. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Kepulauan Riau

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompak
Website : bpsdm.kepriprov.go.id Email : bpsdm@kepriprov.go.id
TANJUNGPINANG Kode Pos 29124

Tanjungpinang, 20 September 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
di
TANJUNGPINANG

Nomor : 893 / 210 /BPSDM.4/IX/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Dukungan Aksi Perubahan PKA

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 460/333/DINSOS/2022 Tanggal 14 September 2022 Perihal Permohonan Dukungan, bersama ini kami menyatakan dukungan terhadap Aksi Proyek Perubahan yang dilakukan oleh **YENI ARDIANTI, S.Si** dengan Judul "Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat Dunia Usaha (GERDAM KEPRI) yang digagas dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022. Demikian disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPULAUAN RIAU,


Drs. H. SARDISON, M.TP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661125 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan).

5. Rapat Penyusunan Rancangan SOP Mekanisme GERDAM Kepri





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL
 Jalan Sultan Mansyur Syah
 Email : sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

Nomor : 005/412/DINSOS/2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : **Undangan Rapat**

Tanjungpinang, 20 September 2022
 Kepada
 Yth. 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
 3. Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial
 4. Sub Koordinator Bidang Penanganan Fakir Miskin
 5. Staf Sekretariat, PFM dan Dayasos di -
 Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan Alur Proses SOP Aksi Perubahan "Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri)". Adapun rapat tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 21 September 2022
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
 Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai

Sehubungan dengan hal tersebut di harapkan Kepada Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada rapat tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
DINAS SOSIAL
 Drs. FRS. SUMBARYADI
 Kepala Bidang Utama Madya
 NIP. 19631117 199103 1 013

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Penyusunan Rancangan Alur Proses SOP "Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri).
 Hari/Tanggal : Rabu / 21 September 2022
 Waktu : 10.00 WIB
 Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
 Peserta Rapat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Bidang Penanganan Fakir Miskin, dan Staf.

Hasil Rapat Adalah Sebagai Berikut:

1. Rapat di rangai oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
2. Dalam rapat ini Membahas Mekanisme Penyediaan Data Kelompok Sasaran yang perlu dibantu oleh donator perseorangan dan dunia usaha
3. Membahas mekanisme pengumpulan dana dari para donator perseorangan
4. Membahas Mekanisme penyaluran bantuan kelompok sasaran

Notulis

6. Rapat Koordinasi Internal Penyusunan Rancangan Pergub GERDAM KEPRI



 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS SOSIAL Jalan Sultan Mansyur Syah Email : sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com TANJUNGPINANG</p>		<p>NOTULEN RAPAT</p>	
<p>Nomor : 005/429/DINSOS/2022 Sifat : Penting Lampiran : - Hal : Undangan Rapat</p>		<p>Tanjungpinang, 22 September 2022</p> <p>Kepada Yth. 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 3. Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial 4. Sub Koordinator Bidang Penanganan Fakir Miskin 5. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian 6. Kepala Sub Bagian Keuangan</p> <p>di - Tempat</p>	
<p>Dengan ini disampaikan bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Upaya Penguatan Keajaiban Melalui Program Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri). Adapun rapat tersebut akan dilaksanakan pada:</p> <p>Hari/Tanggal : Jumat / 23 September 2022 Tempat : Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai</p> <p>Selubungan dengan hal tersebut di harapkan Kepada Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada rapat tersebut.</p> <p>Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.</p>			
		 <p>Drs. EKO SUMBARYADI Pemimpin Utama Madya NIP. 19631117 199103 1 013</p>	
		<p>Hasil Rapat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat di pimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Menjelaskan terkait maksud Pelaksanaan GERDAM Kepri untuk mendorong dan memfasilitasi masyarakat kelas menengah dan kelas atas serta dunia usaha untuk secara kolektif membantu masyarakat kelas mampu. Menjelaskan Ruang lingkup GERDAM Kepri ialah menyediakan wadah yang legal bagi masyarakat kelas menengah dan kelas atas serta dunia usaha untuk menyebarkan bantuan kepada masyarakat kelas mampu yang menjadi sasaran dalam penanganan kemiskinan. Dalam Penyusunan Rancangan Perub GERDAM Kepri, masing-masing bidang memberikan masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait hal-hal yang harus di tetapkan dalam rancangan perub GERDAM Kepri. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyiapkan data calon penerima manfaat dan konsep Berita Acara Serah Terima Data untuk ditandatangani Bersama. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyiapkan data calon penerima manfaat kepada Sekretaris Tim GERDAM Kepri. Sekretariat Tim GERDAM Kepri menagih data calon penerima manfaat ke dalam format yang lebih sederhana. <p style="text-align: right;">Notulis</p>	

7. Konsultasi dengan Mentor, Kepala Dinas Sosial Bpk. Drs. Eko Sumbaryadi terkait draf rancangan Pergum GERDAM KEPRI



8. Penyusunan rancangan Final Pergub GERDAM KEPRI



9. Koordinasi dan Konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau terkait rancangan Peraturan Pergub



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompok - Tanjungpinang
e-Mail : inspektorat@kepriprov.go.id Telephone: 0771-4575019 Kode Pos : 29124

Tanjungpinang, 28 September 2022

Kepada
Yth Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau
di-
Tempat

Nomor : 800/HK/III-Prov.Kepri.01/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Nama-nama Auditor Sebagai Pendukung Dalam Aksi Perubahan Yang Dilakukan oleh YENI ARDIANTI,S.Si

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 460/335/DINSOS/2022 tanggal 15 September 2022 Perihal Permohonan Dukungan dalam rangka Aksi Perubahan yang Dilakukan oleh YENI ARDIANTI,S.Si dengan judul "Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan Masyarakat Dunia Usia (GERDAM Kepri)" pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Bersama surat ini kami sampaikan Nama-nama Auditor yang dimaksud sebagai berikut :

- Nama : Azakaria
Nip : 19710219 200604 1 003
Jabatan : Auditor Madya
- Nama : Fanni Okan Perdana
Nip : 19851008 200904 1 001
Jabatan : Auditor Muda

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


PILIHAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
INSPEKTORAT
DJAROT WIBOWO, S.E.
Perangkat
NIP. 19650824 199303 1 001

10. Koordinasi dan Konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau terkait rancangan Peraturan Pergub



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
SEKRETARIAT DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompok
TANJUNGPINANG
KODE POS : 29124

BERITA ACARA
Nomor: 31 /BA/B.HUKUM/X/2022

Pada hari ini selasa tanggal empat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Kuntum Purnomo, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

II. Nama : Drs. Eko Sumbaryadi
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini Pihak Kesatu telah melakukan proses Legal Drafting terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau yang diprakarsai oleh Pihak Kedua serta telah dilakukan pembahasan/harmonisasi bersama dengan Tim Pembahasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

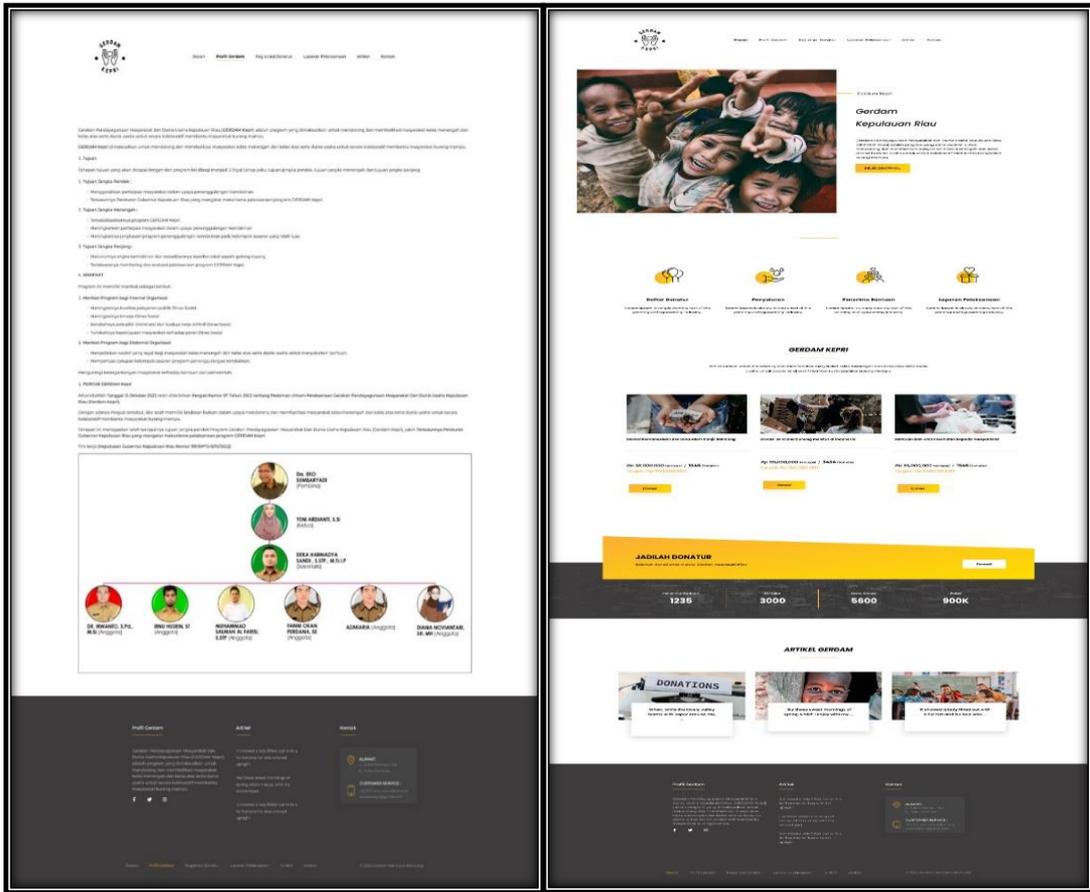
**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

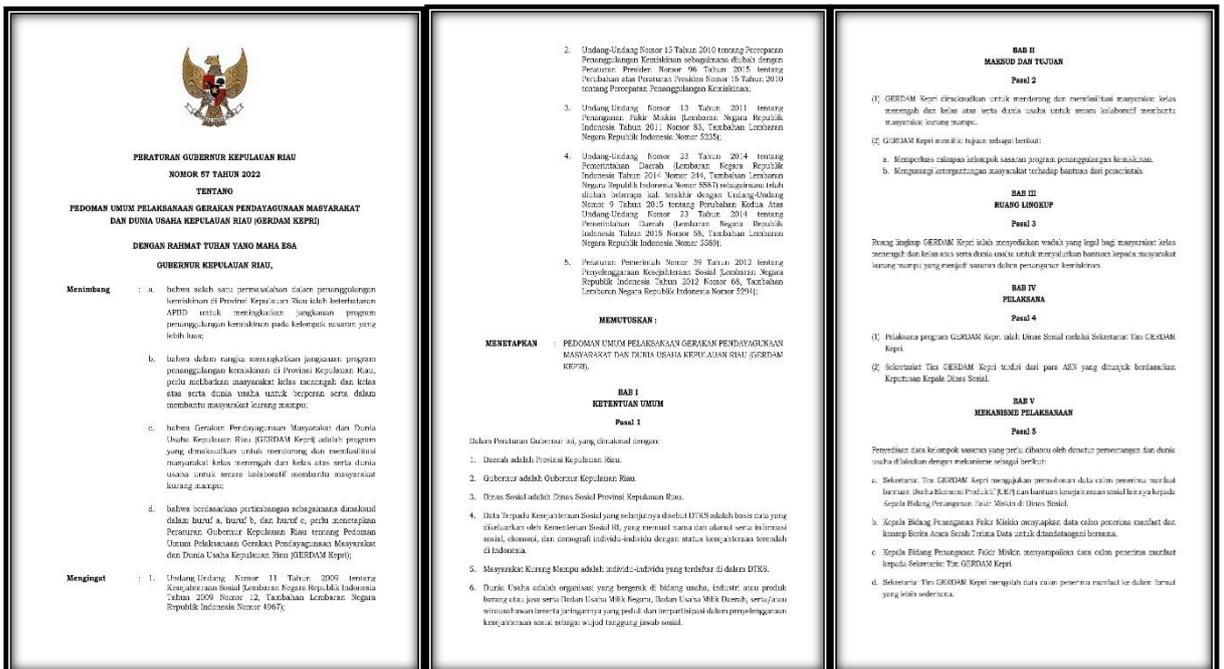
Drs. EKO SUMBARYADI
Pembina Utama Madya
NIP. 196311171991031013

KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196603281997031004

11. Pembuatan Website Program Gerdam Kepri



12. Penetapan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2022



Pasal 6

Pengumpulan dana dari para donatur dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Calon donatur mengisi formulir yang memuat identitas diri, besaran, lokasi, dan jenis bantuan.
- Sekretariat Tim GERMAM Kepri menghubungkan calon donatur untuk mengkonfirmasi data yang sudah diisi pada formulir. Jika jenis bantuan yang diinginkan oleh calon donatur tidak sesuai dengan tugas Dinas Sosial, maka Kadis Sosial membuat surat penolakan.
- Donatur mentransfer dana bantuan ke rekening Sekretariat Tim GERMAM Kepri.
- Sekretariat Tim GERMAM Kepri memantau saldo rekening bantuan hingga saldo mencapai batas minimal yang diperlukan untuk melakukan penyaluran bantuan.

Pasal 7

Penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Sekretariat Tim GERMAM Kepri membuat rencana penyaluran bantuan.
- Dinas Sosial menetapkan daftar penerima manfaat dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- Dinas Sosial mentransfer dana bantuan ke rekening rekening penerima manfaat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- Dinas Sosial menyampaikan Laporan Penyaluran Bantuan kepada donatur.

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 8

Dinas Sosial menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program GERMAM Kepri dan menyampaikannya kepada Gubernur.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 9

Biaya operasional penyelenggaraan GERMAM Kepri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditandatangani di Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
ANSAR AHMAD

Ditandatangani di Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2022

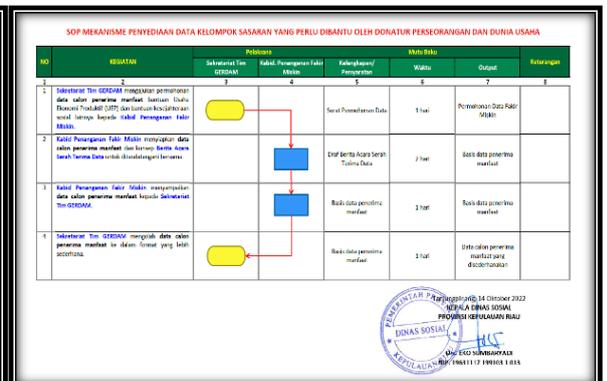
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**
ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 875

13. Penetapan SOP Mekanisme

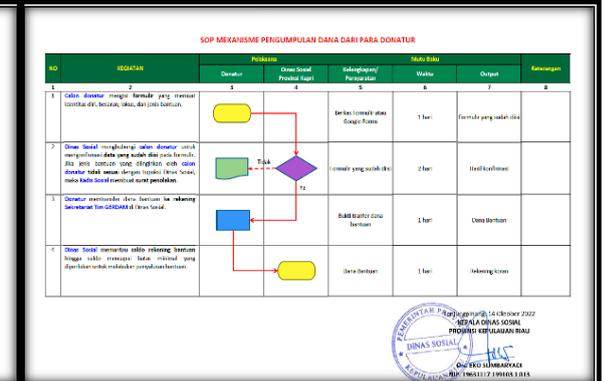
Mekanisme Penyediaan Data Kelompok Sasaran Yang Perlu Dibantu Oleh Donatur Perseorangan Dan Dunia Usaha

	Nomor SOP : 480/371/DINSOS/2022 Tanggal Pembuatan : 14 Oktober 2022 Tanggal Revisi : 17 Oktober 2022 Tanggal Efektif : 17 Oktober 2022 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nama SOP : Mekanisme Penyediaan Data Kelompok Sasaran yang Perlu Dibantu Oleh Donatur Perseorangan dan Dunia Usaha
	Kualifikasi Pelaksana 1. Mengetahui tugas dan fungsi Pelaksana 2. Mengetahui aturan pemberian bantuan
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Penyelenggaraan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERMAM Kepri)	Peralatan / Perlengkapan 1. Ruang rapat internal 2. Komputer 3. Alat Tulis Kantor di
Kewajiban	Pencatatan dan Pendaftar Diinput sebagai arsip dan bahan laporan
Peringatan Dalam rangka meningkatkan jalinan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, perlu melibatkan masyarakat kelas menengah dan kelas atas serta dunia usaha untuk berperan serta dalam membantu masyarakat kurang mampu, maka Gerakan Penyelenggaraan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERMAM Kepri) harus segera dilaksanakan.	



Mekanisme Pengumpulan Dana Dari Para Donatur

	Nomor SOP : 480/371/DINSOS/2022 Tanggal Pembuatan : 14 Oktober 2022 Tanggal Revisi : 17 Oktober 2022 Tanggal Efektif : 17 Oktober 2022 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nama SOP : Mekanisme Pengumpulan Dana dari Para Donatur
	Kualifikasi Pelaksana 1. Mengetahui tugas dan fungsi Pelaksana 2. Mengetahui aturan pemberian bantuan
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Penyelenggaraan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERMAM Kepri)	Peralatan / Perlengkapan 1. Ruang rapat internal 2. Komputer 3. Alat Tulis Kantor di
Kewajiban	Pencatatan dan Pendaftar Diinput sebagai arsip dan bahan laporan
Peringatan Dalam rangka meningkatkan jalinan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, perlu melibatkan masyarakat kelas menengah dan kelas atas serta dunia usaha untuk berperan serta dalam membantu masyarakat kurang mampu, maka Gerakan Penyelenggaraan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERMAM Kepri) harus segera dilaksanakan.	



Mekanisme Penyaluran Bantuan Kepada Kelompok Sasaran

Nomor SOP : 4037/161/2022
 Tanggal Pembuatan : 14 Oktober 2022
 Tanggal Revisi : 17 Oktober 2022
 Tanggal Efektif : 17 Oktober 2022
 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
 Nama SOP : Mekanisme Penyaluran Bantuan Kepada Kelompok Sasaran

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dalam Penyelenggaraan Manajemen dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM-UR)

Kewenangan

- Mengurus tugas dan fungsi Pelaksanaan
- Mengurus urusan penyaluran bantuan

Paralelitas / Pelengkap

- Ruang Kerja Internal
- Konvensional
- Apa Tula Kantor, dll

Pencatatan dan Pendaftaran

Dibuat sebagai arsip dan bahan acuan.

SOP MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK SASARAN

No	Kegiatan	Tahapan			Mula-tamat		Keterangan
		Dasar	Proses	Penyempurnaan / Penyelesaian	Waktu	Output	
1	Dinas Sosial melakukan koordinasi/penyusunan bantuan.		1	Buku manual/daftar bantuan	3 hari	Buku manual/daftar bantuan	
2	Dinas Sosial melakukan daftar penerima manfaat sesuai Kabupaten kepada Dinas Sosial.		2	Daftar penerima manfaat	3 hari	50 Formulir Manfaat	
3	Dinas Sosial melakukan daftar bantuan ke seluruh rumah-rumah penerima bantuan sesuai Kabupaten kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.		3	Si Transmisi Manfaat	7 hari	1000 formulir daftar bantuan	
4	Dinas Sosial melaksanakan laporan Penyaluran Bantuan kepada instansi.		4	Laporan penyaluran bantuan	3 hari	Laporan penyaluran bantuan	

Pekanbaru, 14 Oktober 2022
 Kepala Dinas Sosial
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 DR. H. SUDHARNO
 DR. H. ENRIYATI, S.Pd, S.S

14. Rapat Sosialisasi Dengan Dinas Sosial Se Kabupaten/Kota Melalui Zoom Meeting





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL
Jalan Sultan Mansyur Syah
Email : sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 13 Oktober 2022

Nomor : 005/523/DINSOS/2022
 Sifat : Penting
 Hal : Undangan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota
Se- Provinsi Kepulauan Riau
di -
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Rapat Sosialisasi Konsep Aksi Perubahan yang dilaksanakan oleh sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yaitu Alir Proses Pelaksanaan Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri) melalui zoom meeting. Adapun rapat tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 17 Oktober 2022
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
 Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
 Daring : Lisemane : 754 738 2553
 Passcode : GerdamKepri

Sehubungan dengan hal tersebut di harapkan Kepada Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada rapat tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian, dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


 Dr. FERO SUMBARYADI
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19631117 199103 1 013

NOTULEN RAPAT

Rapat : Alir Proses Pelaksanaan Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri)

Hari/Tanggal : Senin / 17 Oktober 2022

Waktu : 09.00 WIB

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Peserta Rapat : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Bidang Penanganan Fakir Miskin, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Perencana Ahli Muda, dan Staf.

Hasil Rapat Adalah Sebagai Berikut:

- Rapat di dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau melalui Zoom.
- Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mengsosialisasikan Inovasi yang akan dilakukan dalam Aksi Perubahan Pelaksanaan Gerakan Pendayagunaan Masyarakat Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri).
- Dalam Hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kota berperan sebagai Tim Efektif yaitu stakeholder eksternal dimana mempunyai pengaruh (*influence*), kepentingan (*interest*) dan keterlibatan yang sangat kuat terhadap keberhasilan Aksi Perubahan, memiliki pengaruh terhadap kegiatan Pemerintah dan keberadaannya sangat penting bagi organisasi yang memiliki program tersebut.
- Dengan inovasi ini diharapkan memberikan ruang orientasi, semangat memberikan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu menerima manfaat dari Ujraya Penguatan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri, dengan penyediaan fasilitas, kompetensi, dan penugasan pegawai yang tepat untuk mendukung program tersebut.

Notulis

15. Sosialisasi Pergub GERDAM Kepri dengan Sekda Kota Tanjungpinang Bpk. Zulhidayat, S.Hut



16. Koordinasi Sosialisasi Program GERDAM KEPRI dengan BAZNAS

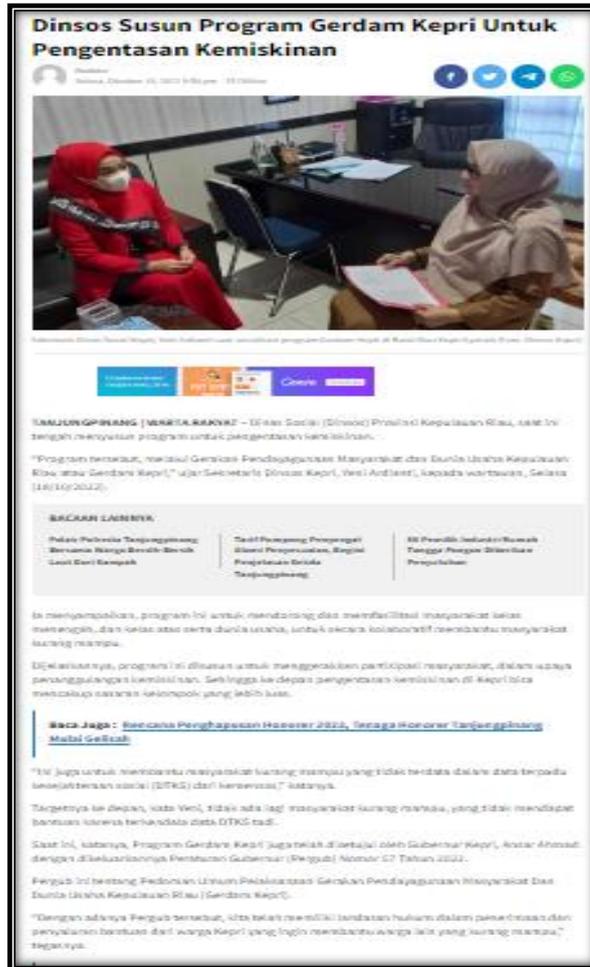


17. Koordinasi Sosialisasi Program GERDAM KEPRI dengan BANK RIAU
KEPRI SYARIAH





18. Menginformasikan Aksi Perubahan di Media Online terkait GERDAM Kepri



19. Informasi Dialog Interaktif Terkait GERDAM KEPRI melalui RRI Tanjungpinang



20. Dialog Interaktif Terkait GERDAM KEPRI melalui TV Tanjungpinang



21. GROUP WHATSAPP KOMUNITAS GERDAMKEPRI



PENUTUP

Burung dara burung cenderawasih

Bisa dicari dulu di papua

Cukup sekian terima kasih

Semoga bermanfaat untuk semua

Sungguh Manis Buah Rambutan

Manis Pula Buah Durian

Program Pengentasan Kemiskinan Kita Upayakan

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Tujuan